



**PENGARUH UMP, INFLASI DAN PDRB TERHADAP PENGANGGURAN DI
PULAU JAWA PERIODE 2010-2017**

SKRIPSI

Oleh :

**Rommy Erzal Ardiansyah
NIM 130810101223**

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
JURUSAN ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2018**



**PENGARUH UMP, INFLASI DAN PDRB TERHADAP PENGANGGURAN
DI PULAU JAWA PERIODE 2010-2017**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ekonomi Pembangunan (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi

Oleh :

Rommy Erzal Ardiansyah

NIM 130810101223

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
JURUSAN ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2018**

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan puji syukur kepada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayah Robi Subakti dan Ibu Ummi Kulsum yang selalu memberikan kasih sayang berupa materi dan doa yang tak pernah henti, nasehat dan semangat yang membuat saya menjadi seperti ini;
2. Adik Saya, Ramadhan Satria Nugraha yang selalu memberi semangat dan doa yang tiada henti;
3. Guru dan Dosen saya sejak Taman Kanak-Kanak hingga saat ini saya di perguruan tinggi yang telah memberikan banyak motivasi dan ilmu yang bermanfaat
4. Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Motto

Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung.

(Terjemahan QS.Ali-imran: 173 - 174)

Kebahagiaan sejati akan terasa ketika engkau selalu mensyukuri nikmat sang ilahi

(Rommy Erzal Ardiansyah)

Percayalah, badai selalu menyisahkan pohon – pohon terkuat!

Tabah Sampai Akhir

(Irfan Ramdhani)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rommy Erzal Ardiansyah

NIM : 130810101223

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “PENGARUH UMP, INFLASI DAN PDRB TERHADAP PENGANGGURAN DI PULAU JAWA PERIODE 2010-2017” adalah benar benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah di ajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas ke absahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus di junjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 26 November 2018

Yang menyatakan,

Rommy Erzal Ardiansyah

NIM 130810101223

SKRIPSI

**PENGARUH UMP, INFLASI DAN PDRB TERHADAP PENGANGGURAN
DI PULAU JAWA PERIODE 2010-2017**

Oleh :

Rommy Erzal Ardiansyah

NIM130810101223

Pembimbing :

Dosen Pembimbing Utama : Dra. Nanik Istiyani, M.Si.

Dosen Pembimbing Anggota : Aisah Jumiati, SE, MP.

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Pengaruh UMP, Inflasi dan PDRB Terhadap
Pengangguran di Pulau Jawa Periode 2010-2017
Nama : Rommy Erzal Ardiansyah
NIM : 130810101223
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan
Konsentrasi : Ekonomi Sumber Daya Manusia
Tanggal Persetujuan : 18 Desember 2017

Pembimbing I

Pembimbing II

Dra. Nanik Istiyani, M.Si
NIP. 196101221987022002

Aisah Jumiati, S.E. MP
NIP. 196809261994032002

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Dr. Sebastiana Viphindartin, S.E, M.Kes
NIP. 196411081989022001

PENGESAHAN

Judul Skripsi

**PENGARUH UMP, INFLASI DAN PDRB TERHADAP
PENGANGGURAN DI PULAU JAWA PERIODE 2010-2017**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Rommy Erzal Ardiansyah

Nim : 130810101223

Jurusan : Ekonomi Pembangunan

Telah dipertahankan didepan panitia penguji pada tanggal :

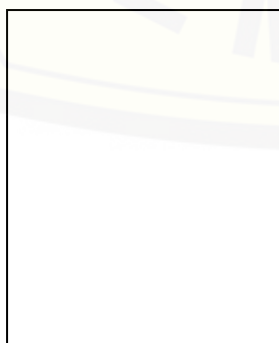
.....

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univeritas Jember.

Susunan Panitia Penguji

1. Ketua : Prof. Dr. Mohammad Saleh, M.Sc. ()
NIP. 19560831 198403 1 002
2. Sekertaris : Dr. Endah Kurnia Lestari, S.E, M.E.()
NIP. 19780414 200112 2 003
3. Anggota : Dr. Lilis Yuliati, S.E, M.Si ()
NIP. 19690718 199512 2 001

Mengetahui/Menyetujui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Jember



Dr. Muhammad Miqdad, S.E, M.M, Ak,CA
NIP. 19710727 199512 1 001

*Pengaruh UMP, Inflasi Dan PDRB Terhadap Pengangguran Di Pulau Jawa
Periode 2010-2017*

ROMMY ERZAL ARDIANSYAH

**Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan
Bisnis, Universitas Jember**

ABSTRAK

Distribusi tenaga kerja yang tidak merata di beberapa wilayah menyebabkan banyak terjadi permasalahan, misalnya pengangguran. Terjadinya pengangguran disebabkan oleh berbagai faktor yang salah satunya berkaitan dengan sisi keefisienan pengeluaran berupa upah yang diterima tenaga kerja dan hasil yang diperoleh secara lebih luas yaitu berupa PDRB. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk (1) Mengetahui seberapa besar pengaruh UMP terhadap pengangguran di Pulau Jawa; (2) Mengetahui seberapa besar pengaruh Inflasi terhadap pengangguran di Pulau Jawa; dan (3) Mengetahui seberapa besar pengaruh PDRB terhadap pengangguran di Pulau Jawa. Hasil regresi data panel menunjukkan secara simultan variabel UMP, Inflasi dan PDRB berpengaruh signifikan terhadap pengangguran di Pulau Jawa. Sedangkan secara uji parsial hasilnya yaitu: (1) Variabel UMP berpengaruh positif terhadap pengangguran di Pulau Jawa; (2) Variabel Inflasi berpengaruh negatif terhadap pengangguran di Pulau Jawa; dan (3) Variabel PDRB berpengaruh negatif terhadap pengangguran di Pulau Jawa. Penelitian ini menyarankan untuk (1) Perlu nya pemerataan upah minimum di setiap provinsi, misalnya dengan meningkatkan daya beli masyarakat, kemampuan perusahaan di daerah, dan lain-lain; (2) Perlu nya kebijakan yang berkaitan dengan suku bunga yang bertujuan untuk mendorong masyarakat untuk menabung. Sehingga jumlah uang yang beredar dapat berkurang dan inflasi dapat ditekan; dan (3) Perlu nya hal-hal yang berkaitan dengan penambahan kewirausahaan, karena wirausaha akan dapat menciptakan lapangan pekerjaan, memanfaatkan dan memobilisasi sumber daya untuk meningkatkan produktivitas nasional baik

Kata Kunci : Pengangguran, Upah Minimum Provinsi, Inflasi, Produk Domestik Regional Bruto

The Effect of Province Minimum Wage, Inflation and Gross Regional Domestic Product On Unemployment In Java Period 2010 - 2017

ROMMY ERZAL ARDIANSYAH

Department of Economics and Development Study, Faculty of Economics and Bussiness, University Of Jember

ABSTRACT

Disribution workers is uneven in some areas causing a lot of problems, such as unemployment. The unemployment caused by various factor,among other things related to this side of the efficiency of spending in the form of PDRB. The purpose of this research are: (1) knowing how much influence of province minimum wage against unemployment in Java; (2) knowing how much influence of inflation against unemployment in Java; and (3) knowing how much influence of UMP against unemployment in Java. The regresion of panel data shows simultaneously that province minimum wage, inflation, and PDRB have a significant effect on unemployment in Java. The resut of partial test shows that: (1) province minimum wage have a positive effect on unemployment in Java; (2) Inflasion have a negative effect on unemployment in Java; and (3) PDRB have a negative effect on unemployment in Java. This research suggests that (1) the need for equalization of minimum wages in each province, for example by increasing the purchasing power of the people, the ability of companies in the region, and others; (2) The need for policies related to interest rates that aim to encourage people to save. So that the amount of money in circulation can be reduced and inflation can be suppressed; and (3) Need for matters relating to the addition of entrepreneurship, because entrepreneurs will be able to create jobs, utilize and mobilize resources to increase national productivity, both the formal sector and the informal sector that can help absorb employment.

Keyword : Unemployment, Province Minimum Wage, Inflation, Gross Regional Domestic Product

RINGKASAN

Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Inflasi dan PDRB Terhadap Pengangguran di Pulau Jawa Periode 2010-2017: Rommy Erzal Ardiansyah, 130810101223:2018: Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Distribusi tenaga kerja yang tidak merata di beberapa wilayah menyebabkan banyak terjadi permasalahan, misalnya pengangguran. Terjadinya pengangguran disebabkan oleh berbagai faktor yang salah satunya berkaitan dengan sisi keefisienan pengeluaran berupa upah yang diterima tenaga kerja dan hasil yang diperoleh secara lebih luas yaitu berupa PDRB. Peningkatan biaya kebutuhan hidup dari tahun ke tahun tidak terlepas dari perkembangan tingkat inflasi. Dalam pendistribusian upah atau gaji tersebut disesuaikan dengan kemampuan atau timbal baik yang diberikan tenaga kerja tersebut terhadap rumah tangga atau perusahaan. maka penting untuk dibahas dan dikaji hubungan antara upah minimum provinsi (UMP), Inflasi dan PDRB terhadap tingkat pengangguran yang ada.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Seberapa besar pengaruh UMP terhadap pengangguran di Pulau Jawa? (2) Seberapa besar pengaruh Inflasi terhadap pengangguran di Pulau Jawa? (3) Seberapa besar pengaruh PDRB terhadap pengangguran di Pulau Jawa?

Unit analisis dalam penelitian ini pengangguran di Pulau Jawa tahun 2010-2017 sebagai variabel terikat, sedangkan variabel bebas atau variabel independen pada penelitian ini adalah UMP, Inflasi dan PDRB di Pulau Jawa tahun 2010-2017. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel menggunakan Eviews 9.

Didalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga variabel yaitu : (1) UMP; (2) Inflasi; dan (3) PDRB. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan secara simultan variabel UMP, Inflasi dan PDRB berpengaruh signifikan terhadap pengangguran di Pulau Jawa. Sedangkan secara uji parsial hasilnya yaitu: (1)

Variabel UMP berpengaruh positif terhadap pengangguran di Pulau Jawa; (2) Variabel Inflasi berpengaruh negatif terhadap pengangguran di Pulau Jawa; dan (3) Variabel PDRB berpengaruh negatif terhadap pengangguran di Pulau Jawa. Selain uji simultan dan parsial peneliti menggunakan uji asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada masalah uji asumsi klasik dalam penelitian ini oleh karena itu dalam penelitian ini terbebas dari masalah asumsi klasik.

Penelitian ini menyarankan untuk 1. Perlu nya pemerataan upah minimum di setiap provinsi, misalnya dengan meningkatkan daya beli masyarakat, kemampuan perusahaan di daerah, dan lain-lain. 2. Perlu nya kebijakan yang berkaitan dengan suku bunga yang bertujuan untuk mendorong masyarakat untuk menabung. Sehingga jumlah uang yang beredar dapat berkurang dan inflasi dapat ditekan. 3. Perlu nya hal-hal yang berkaitan dengan penambahan kewirausahaan, karena wirausaha akan dapat menciptakan lapangan pekerjaan, memanfaatkan dan memobilisasi sumber daya untuk meningkatkan produktivitas nasional baik sektor formal maupun informal yang dapat membantu penyerapan tenaga kerja.

PRAKATA

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh UMP, Inflasi dan PDRB terhadap Pengangguran di Pulau Jawa Periode 2010 – 2017”. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penyusunan Skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, bantuan berupa motivasi, nasehat, tenaga, pikiran, materi dan saran maupun kritik yang membangun. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Dra. Nanik Istiyani, M.Si selaku dosen pembimbing I dan Ibu Aisah Jumiaty, S.E, ME selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan motivasi, saran dan kritik serta pengarahan terhadap penulis;
2. Bapak Dr. M. Miqdad, SE. MM, Ak sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam mengerjakan penelitian ini;
3. Ibu Dr. Sebastiana Viphindrartin, SE, M.Kes. sebagai Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yang selalu memberikan dukungan dan motivasi dalam mengerjakan penelitian ini;.
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen beserta staf karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember serta Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Perpustakaan Pusat;
5. Kedua orang tua saya, Ayah Robi Subakti dan Ibu Ummi Kulsum, terimakasih yang tak terhingga atas doa, dukungan materi maupun moral, motivasi, kerja keras, kesabaran dan kasih sayang selama ini;

6. Adik saya Ramadhan Satria Nugraha yang selalu memberikan semangat dan doa;
7. Nenek terbaik Alm.Mbah Suminah, Keluarga Mbah Suminah dan Keluarga Bani Tobin yang selalu mendukung dan memberikan motivasi serta doa sehingga membuat penulis menjadi lebih baik lagi;
8. Noviana Dwi Haryati, terimakasih telah menjadi partner setia menemani diskusi diantara bimbingan skripsi, kerja serta revisi sampai skripsi ini selesai dibuat;
9. Sahabat PTPN 12 Kebun Sungailembu (Wahyu dan Singgih) dan teman angkatan (Ari, Ade, Rian, dan Dzulhaemi) yang dengan semangatnya memotivasi saya sampai skripsi ini selesai;
10. Sahabat alumni kontrakan D-4 perumahan taman kampus, Crew Banyuwangi Juara, Reborn Family, Crew Indonesia Traveler, Crew CV. Epic Indo, Keluarga Besar MAHAPENA Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember dan Sahabat KKN 120 Desa Jambewungu Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso yang selalu mensupport dan memberikan saran penulis;
11. Seluruh Sahabat – Sahabat saya yang tidak bisa saya sebutkan satu - satu, terimakasih atas bantuan dan supportnya;

Akhir kata tidak ada sesuatu yang sempurna didunia ini, penulis menyadari atas kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun penulis amat di harapkan bagi penyempurnaaan tugas akhir ini. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan tambahan pengetahuan bagi penulisan karya tulis selanjutnya. Amien.

Jember, 26 November 2018

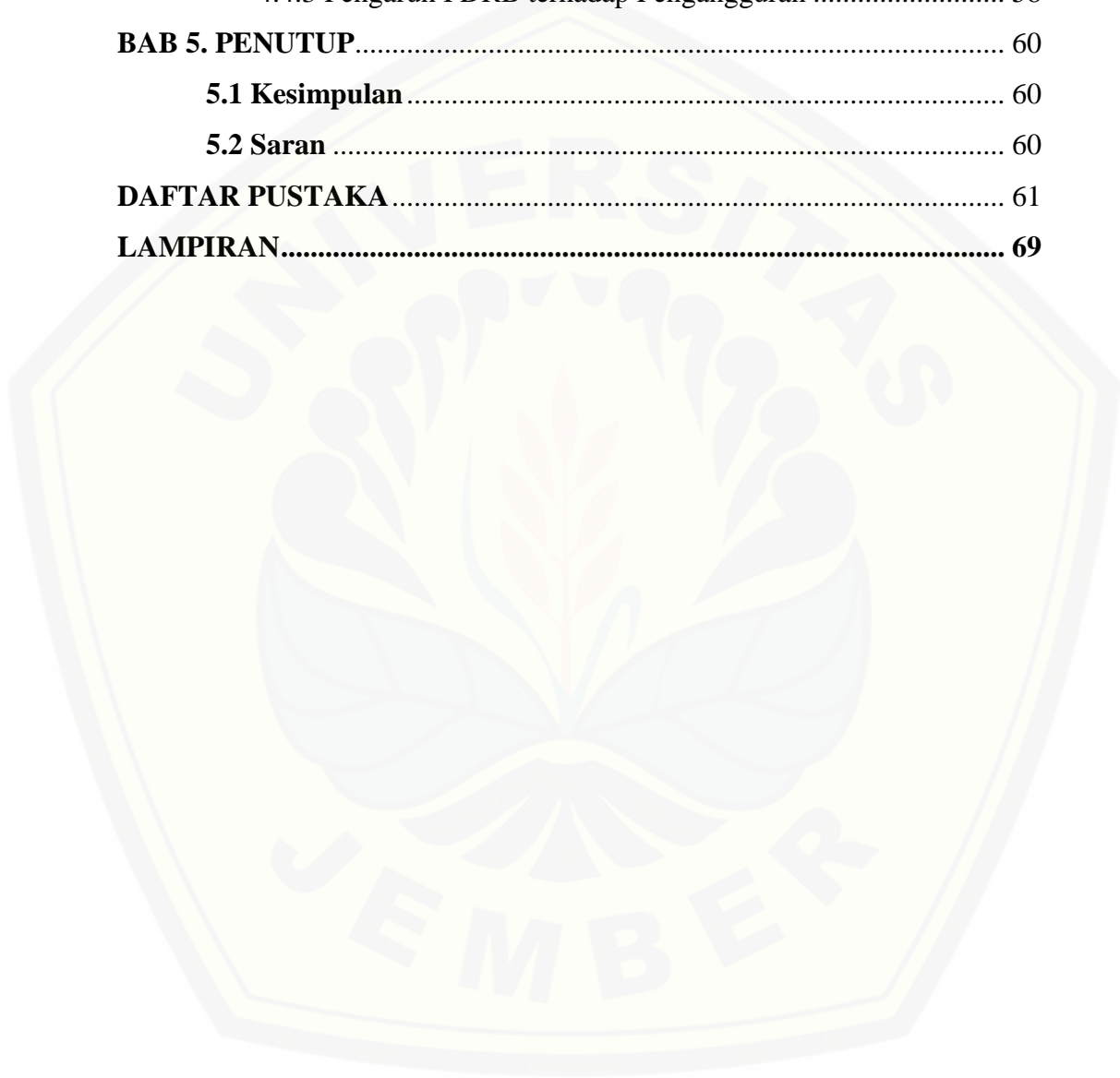
Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMPUL.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PEMBIMBING	v
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
RINGKASAN/SUMMARY.....	x
PRAKATA	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Landasan Teori	8
2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi.....	8
2.1.2 Pengangguran	10
2.1.3 Upah Minimum Provinsi.....	16
2.1.4 Inflasi	18

2.1.5 Produk Domestik Regional Bruto	20
2.2 Penelitian Terdahulu	24
2.3 Kerangka Konseptual	29
2.4 Hipotesis Penelitian.....	30
BAB 3. METODE PENELITIAN	31
3.1 Jenis Penelitian	31
3.2 Jenis dan Sumber Data	31
3.3 Spesifikasi Model Penelitian	31
3.4 Metode Analisis Regresi Data Panel.....	32
3.5 Pemilihan Model Pengolahan Data	33
3.6 Uji Statistik	35
3.6.1 Uji F	35
3.6.2 Uji t	36
3.6.3 Koefisien Determinasi.....	37
3.7 Uji Asumsi Klasik.....	37
3.7.1 Uji Normalitas	37
3.7.2 Uji Multikolinearitas	38
3.7.3 Uji Autokorelasi.....	38
3.7.4 Uji Heteroskedastisitas.....	39
3.5 Definisi Operasional Variabel.....	39
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	41
4.1 Gambaran Umum Pulau Jawa	41
4.2 Deskripsi Variabel Penelitian	42
4.2.1 Pengangguran di Pulau Jawa.....	42
4.2.2 Upah Minimum Provinsi di Pulau Jawa	43
4.2.3 Inflasi di Pulau Jawa	44
4.2.4 PDRB di Pulau Jawa	45
4.3 Hasil Analisis Data	46
4.3.1 Hasil <i>Chow Test</i> dan <i>Hausman Test</i>	46
4.3.2 Analisis Regresi Data Panel.....	48
4.3.3 Uji Statistik	49

4.3.4 Uji Asumsi Klasik.....	51
4.4 Hasil Regresi.....	54
4.4.1 Pengaruh Upah Minimum Provinsi terhadap Pengangguran.....	55
4.4.2 Pengaruh Inflasi terhadap Pengangguran.....	57
4.4.3 Pengaruh PDRB terhadap Pengangguran	58
BAB 5. PENUTUP.....	60
5.1 Kesimpulan	60
5.2 Saran	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61
LAMPIRAN.....	69

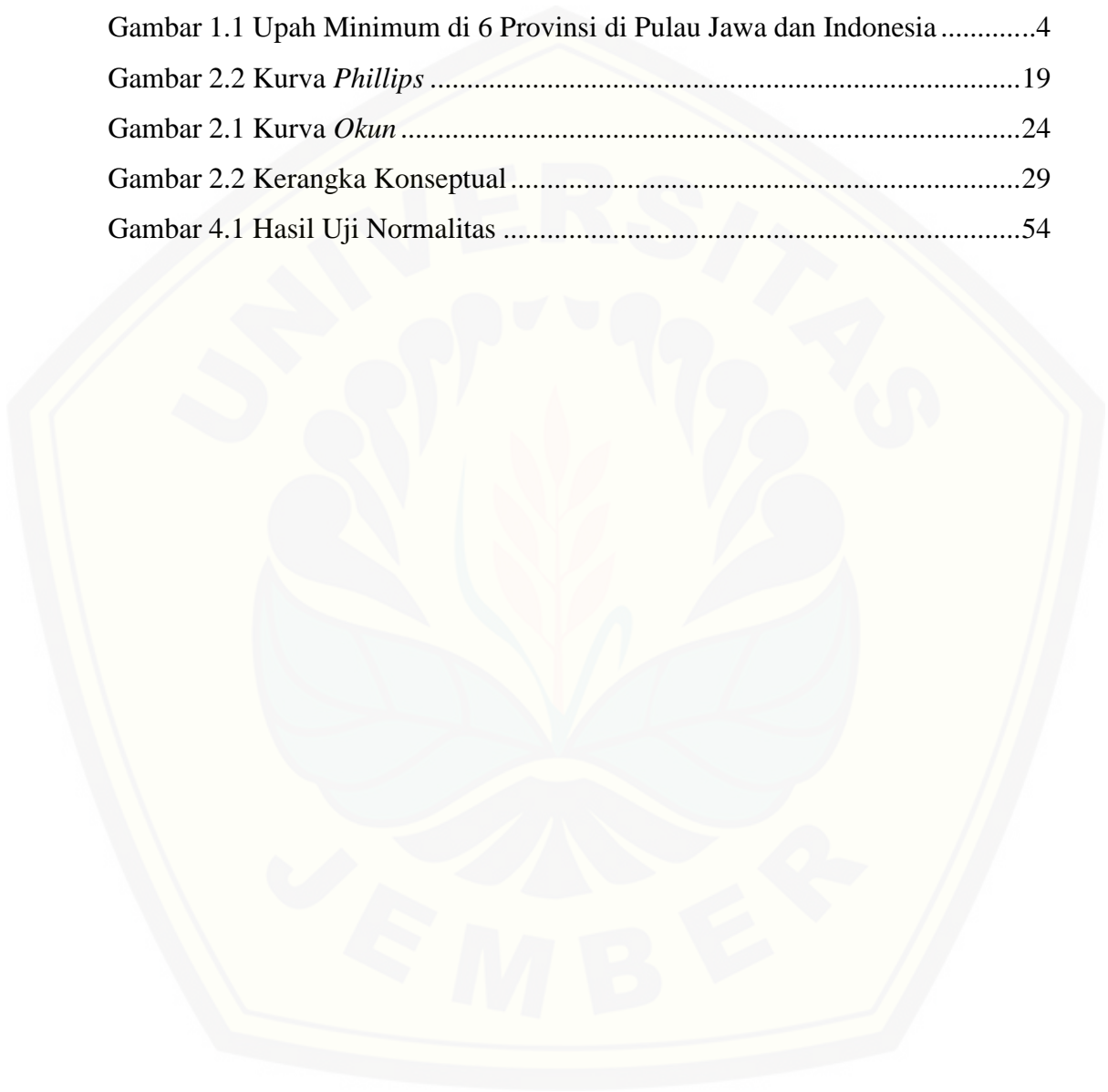


DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Distribusi Jumlah Penduduk, Angkatan Kerja, Bukan Angkatan Kerja, dan Pengangguran setiap Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2015	2
Tabel 1.2 Kontribusi PDRB di Tiap Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2015.....	6
Tabel 2.1 Tinjauan Penelitian Sebelumnya	27
Tabel 3.1 Tabel Pengujian <i>Durbin Watson</i>	38
Tabel 3.2 Kriteria Keputusan Pengujian <i>Durbin Watson</i>	39
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin di Pulau Jawa Tahun 2015 (jiwa)	42
Tabel 4.2 Laju Pertumbuhan Pengangguran di Pulau Jawa tahun 2010–2015 (persen)	42
Tabel 4.3 UMP di Pulau Jawa tahun 2010 – 2015 (rupiah).....	43
Tabel 4.4 Inflasi di Pulau Jawa tahun 2010 – 2015 (persen)	44
Tabel 4.5 PDRB Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2010 – 2015 (persen)	45
Tabel 4.6 Hasil Uji <i>Chow</i>	46
Tabel 4.7 Hasil Uji <i>Hausman</i>	47
Tabel 4.8 Hasil Analisis Data Panel Menggunakan Pendekatan Random Effect	48
Tabel 4.9 Hasil Uji F.....	49
Tabel 4.10 Hasil Uji t.....	50
Tabel 4.11 Hasil Uji Adjusted R-squared	51
Tabel 4.12 Hasil Uji Multikolinieritas	52
Tabel 4.13 Hasil Uji Heterokedastisitas (<i>Glejser</i>)	53

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Upah Minimum di 6 Provinsi di Pulau Jawa dan Indonesia	4
Gambar 2.2 Kurva <i>Phillips</i>	19
Gambar 2.1 Kurva <i>Okun</i>	24
Gambar 2.2 Kerangka Konseptual	29
Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas	54



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Pengangguran di Pulau Jawa Tahun 2010 – 2015 (jiwa).....	64
UMP di Pulau Jawa Tahun 2010 – 2015 (rupiah).....	64
Inflasi di Pulau Jawa Tahun 2010 – 2015 (persen).....	64
PDRB di Pulau Jawa Tahun 2010 – 2015 (miliar rupiah)	64
Hasil Regresi Data Panel (<i>Common Effect</i>)	65
Hasil Regresi Data Panel (<i>Fixed Effect</i>)	66
Hasil Regresi Data Panel (<i>Random Effect</i>)	67
Uji <i>Chow</i>	68
Uji <i>Hausman</i>	69
Hasil Uji Multikolinieritas	70
Hasil Uji Heteroskedastisitas	70
Hasil Uji Normalitas	71

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi merupakan proses berkelanjutan memperbaiki keadaan meningkatkan hasil perekonomiannya. Pembangunan ekonomi merupakan keseluruhan proses yang melibatkan keadaan dan pengembangan sosial, budaya, dan ekonomi melalui serangkaian usaha yang dilakukan untuk mempengaruhi proses transformasi menuju arah dalam kemajuan ekonomi, serta bermanfaat bagi masyarakat (Todaro, 2012). Pembangunan perekonomian yang baik dan seimbang adalah berhasilnya teratasi berbagai masalah baik dari hal kecil sampai besar yang ada didalam suatu wilayah selain itu juga berjalanya kebijakan yang diberikan oleh pemerintah untuk menjaga dan meningkatkan perekonomian.

Secara umum, masalah-masalah yang terkait dengan pembangunan ekonomi dapat dibahas berdasarkan keadaan yang sedang terjadi dan proses pembangunan yang terkait dengan masalah tersebut. Masalah perekonomian yang sifatnya kecil ini terkait dengan efisiensi kegiatan produksi sedangkan yang sifatnya besar terkait dengan hal-hal yang mempengaruhi cukup besar bagi hasil pembangunan. Pembangunan ekonomi adalah perubahan dalam struktur dan corak perekonomian baik dalam kegiatan perekonomian kecil (mikro ekonomi) maupun lingkup yang besar (makro ekonomi). Dalam melakukan kegiatan perekonomian lingkup makro tersebut berkaitan dengan efisiensi terhadap masalah-masalah yang dihadapi melalui kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki keadaan-keadaan yang tidak sesuai dan membawa ke arah yang lebih untuk kesejahteraan penduduknya (Sukirno, 2011).

Masalah pengangguran cukup berpengaruh tinggi terhadap tingkat keberhasilan dari suatu wilayah atau Negara dalam penyerapan tenaga kerja yang ada kedalam lapangan kerja yang ada. Selain itu, distribusi populasi penduduk atau tenaga kerja yang hanya berpusat di beberapa wilayah saja akan berhubungan dengan hasil yang diperoleh yaitu salah satunya pendapatan total dari wilayah tersebut. Berikut ini adalah tabel dari distribusi jumlah penduduk, angkatan kerja,

bukan angkatan kerja, dan pengangguran setiap provinsi di pulau jawa dan 28 provinsi lainnya di Indonesia tahun 2015.

Tabel 1.1 Distribusi Jumlah Penduduk, Penduduk Bekerja, Pengangguran dan Angkatan Kerja setiap Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2017 (persen)

Provinsi	Distribusi Penduduk	Distribusi Penduduk Bekerja	Distribusi Pengangguran	Distribusi Angkatan Kerja
DKI Jakarta	3,96	3,73	4,93	3,79
Jawa Barat	18,34	16,98	26,13	17,48
Jawa Tengah	13,08	14,20	11,70	14,06
DI Yogyakarta	1,44	1,70	0,91	1,65
Jawa Timur	15,00	16,61	11,91	16,35
Banten	4,75	4,20	7,38	4,37
28 Provinsi Lainnya	43,43	42,59	37,04	42,29
INDONESIA	100	100	100	100

Sumber: Statistika Indonesia Tahun 2018

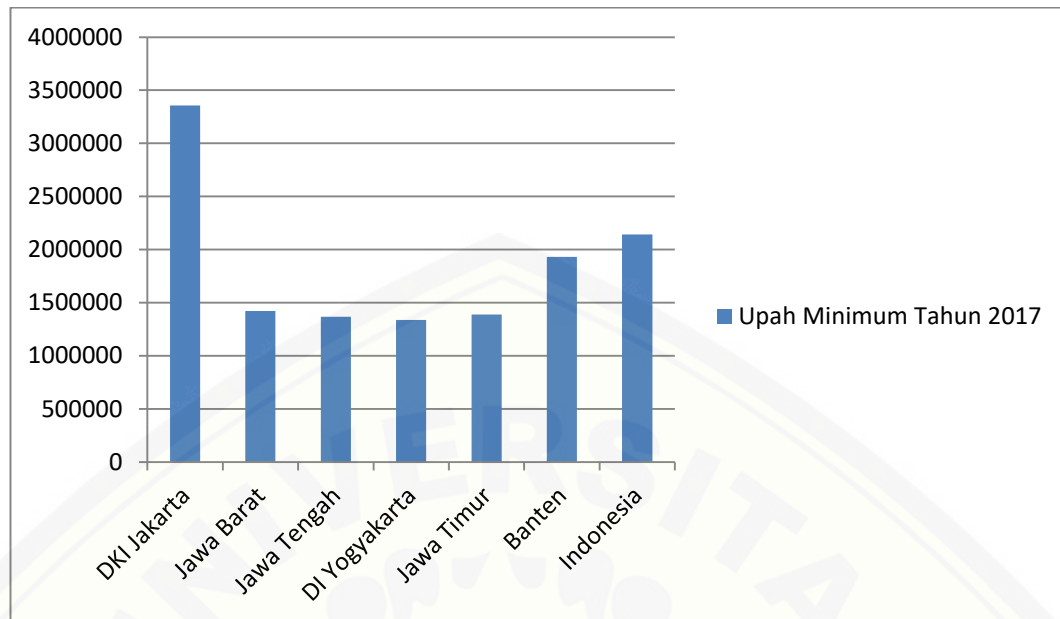
Berdasarkan Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa distribusi jumlah penduduk, penduduk bekerja, pengangguran, dan angkatan kerja di Pulau Jawa melebihi 50 persen dari total distribusi jumlah penduduk, penduduk bekerja, pengangguran, dan angkatan kerja di Indonesia. Keadaan ini menyebabkan tidak meratanya distribusi penduduk di beberapa provinsi di Indonesia. Dengan jumlah provinsi di Indonesia yang mencapai 34 provinsi, 6 provinsi saja dengan luas wilayah yang tidak begitu luas dihuni lebih dari 50 persen penduduknya. Secara berurutan dapat diketahui bahwa dampak dari distribusi jumlah penduduk yang tidak merata tersebut, distribusi angkatan kerja mencapai 57,71 persen atau lebih banyak dari distribusi angkatan kerja 28 provinsi lainnya di Indonesia yaitu sebesar 42,29 persen dan juga distribusi penduduk bekerja mencapai 57,41 persen atau lebih banyak dari distribusi penduduk bekerja di 28 provinsi lainnya di Indonesia yaitu sebesar 42,59 persen. Sedangkan distribusi pengangguran di Pulau Jawa yaitu sebesar 62,96 persen, yang berarti bahwa distribusi pengangguran di Pulau Jawa melebihi 50 persen dari total jumlah pengangguran di Indonesia.

Ketersediaan tenaga kerja yang tidak merata atau lebih banyak tersedia di beberapa wilayah akan menyebabkan hasil dari pembangunan perekonomian secara umum di daerah berbeda-beda, yang tersaji dalam PDRB. Sehingga berbagai masalah dari distribusi tenaga kerja yang hanya berpusat di beberapa

wilayah juga dapat berpengaruh terhadap masalah-masalah yang terkait dari sisi tenaga kerja tersebut, seperti masalah penyerapan tenaga kerja yang tidak merata atau yang lebih buruk adalah pengangguran.

Hal-hal yang berkaitan dengan masalah pengangguran penting untuk dibahas dari sisi mana saja dan faktor apa saja yang mempengaruhinya. Proses penggunaan tenaga kerja dalam lingkup lebih kecil, yaitu rumah tangga atau perusahaan. Dalam penggunaan tenaga kerja yang ada ini terkait dengan penggunaan faktor-faktor produksi dan efisien untuk mendapatkan hasil produksi yang maksimal. Hasil produksi yang maksimal ini terkait dengan pengeluaran suatu rumah tangga atau perusahaan. Efisiensi pengeluaran terhadap penggunaan tenaga kerja berupa upah atau gaji yang di sesuaikan menurut kebijakan pemerintah yaitu UMR ini juga berpengaruh pada hasil yang diterima disuatu wilayah tersebut. Dapat diketahui bahwa ketersediaan tenaga kerja yang melimpah dan penggunaannya yang maksimal ini dapat mempengaruhi hasil yang diterima berupa pendapatan total atau PDRB di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi atau PDRB yang tinggi ini dapat diartikan bahwa tenaga kerja dapat memberikan dampak positif atau kegiatan perekonomian yang memberikan hasil cukup tinggi. Lebih singkatnya, penyerapan tenaga kerja dapat terserap cukup baik dalam beberapa lapangan pekerjaan yang ada atau masalah pengangguran dapat cukup teratasi. Hubungan baik antara masalah pengangguran dengan pertumbuhan ekonomi ini dapat dijelaskan menurut Hukum Okun bahwa pada saat pertumbuhan ekonomi meningkat, maka tingkat pengangguran menjadi menurun, begitu juga sebaliknya.

Di Indonesia terdapat upah minimum yang terbentuk baik dari kabupaten dan kota maupun di provinsi. Dalam pembagian upah minimum tersebut, disesuaikan keadaan dan tingkat kemampuan masing-masing daerah melalui berbagai macam kegiatan produksi yang ada, sehingga dapat menemukan nilai yang tepat atau kemampuan yang sesuai atas upah yang pantas diterima oleh tenaga kerja (Suparjan dan Suyatno, 2008). Detail data upah minimum yang ada di 6 provinsi dan Indonesia dapat ditunjukkan pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Upah Minimum di Pulau Jawa dan Indonesia Tahun 2017 (rupiah) (Sumber: BPS 2018, diolah)

Berdasarkan Gambar 1.1, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan yang cukup jauh antara masing-masing provinsi yang ada di Pulau Jawa. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum sebesar Rp. 2.700.000, dan merupakan upah minimum yang terbesar di Indonesia. Namun, hal berbeda terjadi pada 5 provinsi lainnya yang memiliki upah minimum yang jauh lebih sedikit dari upah minimum yang terbentuk di Indonesia yaitu sebesar Rp. 1.790.342. Dapat diketahui bahwa upah minimum provinsi terbentuk dari rata-rata yang ada di kabupaten dan kota yang ada di dalamnya. Upah minimum yang diterima di 5 provinsi yang hanya berkisar dibawah Rp. 1.790.342 (upah minimum di Indonesia) tersebut dapat mempengaruhi pendapatan total daerah yang ada tersebut.

Penggunaan tenaga kerja sebagai penggerak roda perekonomian atau produksi terkait dengan produktifitas dan timbal balik yang diperolehnya berupa upah atau gaji. Besar kecilnya upah atau gaji cukup berpengaruh pada efisiensi pengeluaran dari rumah tangga atau perusahaan tersebut maupun tingkat kesejahteraan tenaga kerja dari upah atau gaji yang diterimanya. Terdapat hal-hal yang mempengaruhi penggunaan tenaga kerja yaitu kualitas dan kuantitas tenaga kerja. Kualitas tenaga kerja dapat tercipta apabila memenuhi beberapa hal yang dapat membuat tenaga kerja tersebut dapat bersaing maupun produktif dalam

tenaga kerja, seperti tingkat pendidikan yang melatarbelakangi ataupun tingkat upah yang diterimanya dalam melakukan kegiatan perkonomian tersebut (Sulistiawati, 2013).

Dalam pendistribusian upah atau gaji tersebut di sesuaikan dengan kemampuan atau timbal baik yang diberikan tenaga kerja tersebut terhadap rumah tangga atau perusahaan. Namun, dalam pendistribusian atau pembagian upah tersebut juga diatur oleh pemerintah melalui kebijakan yang bertujuan untuk menjaga kesejahteraan masing-masing tenaga kerja yang ada. Kebijakan pemerintah terhadap upah atau gaji tersebut diatur dalam suatu peraturan yang disesuaikan dengan keadaan perekonomian atau kemampuan dari suatu daerah dapat memberikan batas minimum upah atau gaji tersebut. Kebijakan upah minimum tersebut terdapat di beberapa provinsi dan ini jumlahnya berbeda-beda. Kebijakan upah minimum ini disebut dengan upah minimum provinsi UMP.

Peningkatan biaya kebutuhan hidup dari tahun ke tahun tidak terlepas dari perkembangan tingkat inflasi, yaitu dimana keadaan yang menunjukkan kenaikan tingkat harga umum yang berlangsung secara terus menerus. Semua negara di dunia selalu menghadapi permasalahan inflasi ini. Oleh karena itu, tingkat inflasi yang terjadi dalam suatu negara merupakan salah satu ukuran untuk mengukur baik buruknya masalah ekonomi yang dihadapi suatu negara sehingga pemerintah harus menjalankan kebijakan yang tepat guna menjaga dan mengawasi laju inflasi. Tingkat inflasi yang berkisar antara 2 sampai 4 persen dikatakan tingkat inflasi yang rendah. Selanjutnya tingkat inflasi yang berkisar antara 7 sampai 10 persen dikatakan inflasi yang tinggi. Namun demikian ada negara yang menghadapi tingkat inflasi yang lebih serius atau sangat tinggi, misalnya Indonesia pada tahun 1966 dengan tingkat inflasi 650 persen. Inflasi yang sangat tinggi tersebut disebut hiper inflasi.

Supartoyo dkk (2013), menyatakan bahwa sebagai sebuah negara, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kekayaan alam terbesar di dunia. Kekayaan yang besar ini tidak menjamin adanya tercapai kesejahteraan masyarakat yang merata. Ketidakmerataan ini disebabkan kurang adanya kegiatan yang efektif dan efisien dalam menggunakan sumber daya yang ada.

Ketidakmerataan terjadi pada beberapa wilayah di Indonesia, terutama pada hasil yang ditunjukkan dalam pembangunan dan kegiatan perekonomiannya berupa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Kontribusi PDRB di tiap provinsi di Pulau Jawa ditunjukkan oleh Tabel 1.2.

Tabel 1.2 Kontribusi PDRB di Tiap Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2017

Provinsi	PDRB (Miliar Rupiah)	PDRB (persen)
DKI Jakarta	1.635.856	16,36
Jawa Barat	1.342.953	13,43
Jawa Tengah	894.050	8,94
DI Yogyakarta	92.301	9,23
Jawa Timur	1.482.148	14,82
Banten	409.960	4,10
28 Provinsi Lainnya	5.312.548	53,14
INDONESIA	9.996.207	100,00

Sumber: BPS Tahun 2018 (diolah)

Berdasarkan Tabel 1.2, kontribusi PDRB di Pulau Jawa hampir melebihi 50 persen dari total PDRB di Indonesia yaitu sebesar 46,86 persen. Sedangkan kontribusi PDRB di 28 provinsi lainnya yaitu sebesar 53,14 persen. Tidak meratanya jumlah PDRB yang diterima oleh tiap provinsi ini mengakibatkan perlunya analisis regional tiap provinsi terhadap karakteristik atau faktor-faktor yang melatarbelakangi keadaan tersebut.

Apabila dikaitkan dengan keadaan ketenagakerjaan, maka akan memiliki hubungan positif dengan keadaan atau jumlah tenaga kerja yang ada, sehingga berbagai bentuk masalah akibat dari kepadatan tenaga kerja yang ada tersebut dapat berpengaruh baik dari sisi buruk produktivitas tenaga kerja, yaitu salah satunya pengangguran.

Berdasarkan latar belakang mengenai distribusi tenaga kerja yang tidak merata di beberapa wilayah yang telah dijelaskan sebelumnya sampai terjadinya masalah pengangguran serta berbagai faktor atau hal hal yang mempengaruhi masalah pengangguran, yang berkaitan dengan sisi keefisienan pengeluaran berupa upah yang diterima tenaga kerja dan hasil yang diperoleh secara lebih luas yaitu pertumbuhan ekonomi, maka penting untuk dibahas dan dikaji hubungan

antara upah minimum provinsi (UMP), Inflasi dan PDRB terhadap tingkat pengangguran yang ada. Keadaan atau masalah tersebut sesuai dengan pembahasan diatas yaitu yang terjadi di 6 provinsi di Pulau Jawa yang telah disebutkan yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur dan Banten.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Seberapa besar pengaruh UMP terhadap pengangguran di Pulau Jawa?
2. Seberapa besar pengaruh Inflasi terhadap pengangguran di Pulau Jawa?
3. Seberapa besar pengaruh PDRB terhadap pengangguran di Pulau Jawa?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh UMP terhadap pengangguran di Pulau Jawa;
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Inflasi terhadap pengangguran di Pulau Jawa;
3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh PDRB terhadap pengangguran di Pulau Jawa.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, maka manfaat penelitian yang diharapkan adalah:

1. Sumbangan pemikiran bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan pembangunan khususnya dalam masalah pengangguran di Pulau Jawa;
2. Bahan informasi bagi semua pihak yang membutuhkan informasi yang berkaitan dengan pembangunan dan pertumbuhan di Indonesia, khususnya provinsi di Pulau Jawa.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Teori pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai penjelasan mengenai faktor-faktor apayang menentukan kenaikan output perkapita dalam jangka panjang, dan penjelasan mengenai bagaimana faktor-faktor tersebut sehingga terjadi proses pertumbuhan (Boediono, 2008). Sehingga persentase pertambahan output itu haruslah lebih tinggi dari persentase pertambahan jumlah penduduk dan ada kecenderungan dalam jangka panjang bahwa pertumbuhan itu akan terus berlanjut.

Boediono (2008), mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional maupun pertumbuhan ekonomi daerah berfokus pada proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Sejalan dengan pendapatBoediono, menurut Jhingan (2010) pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kemampuan suatu negara (daerah) untuk menyediakan barang-barang ekonomi bagi penduduknya, yang terwujud dengan adanya kenaikan output nasional secara terus menerus yang disertai dengan kemajuan teknologi serta adanya penyesuaian kelembagaan, sikap dan ideologi yang dibutuhkannya.

Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor penting (Arsyad, 2010) seperti akumulasi modal yang merupakan semua investasi baru yang berwujud tanah (lahan), peralatan fiskal dan sumberdaya manusia (*human resources*), akan terjadi jika ada bagian dari pendapatan sekarang yang ditabung dan kemudian diinvestasikan untuk memperbesar output pada masa yang akan datang. Akumulasi modal akan menambah sumberdaya-sumberdaya yang baru dan akan meningkatkan sumberdaya-sumberdaya yang telah ada. Kemudian pertumbuhan penduduk dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja (*labor force*) dianggap sebagai faktor yang positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi, namun kemampuan merangsang pertumbuhan ekonomi bergantung pada kemampuan sistem ekonomi yang berlaku dalam menyerap dan mempekerjakan tenaga kerja yang ada secara produktif. Selain

faktor-faktor tersebut, kemajuan teknologi merupakan faktor yang paling penting bagi pertumbuhan ekonomi. Dalam bentuknya yang paling sederhana, kemajuan teknologi disebabkan oleh cara-cara baru dan cara-cara lama yang diperbaiki dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan tradisional.

a. Teori Pertumbuhan Ekonomi Menurut Klasik

Pada era sebelum tahun 1870 para ekonom mengemukakan bahwa untuk mencapai pembangunan ekonomi yang tinggi dibutuhkan peran modal sebagai bagian terpenting. Penggunaan modal tersebut untuk meningkatkan produksi dari sisi penawaran yang tinggi, sehingga berdampak pada tingginya jumlah permintaan. Namun dalam prakteknya, penawaran yang tinggi tersebut tidak diimbangi oleh permintaan yang tinggi pula sehingga menimbulkan masalah seperti kelebihan produksi, pengangguran dan deflasi. Tokoh-tokoh pertumbuhan Klasik yaitu Adam Smith, David Ricardo, Robert Malthus. Secara umum asumsi yang digunakan Kaum Klasik yaitu perekonomian dalam keadaan *full employment*, perekonomian terdiri dari dua sektor (produsen dan konsumen), tidak ada campur tangan pemerintah dan perekonomian diserahkan ke mekanisme pasar.

b. Pandangan Adam Smith

Menurut Sukirno (2011), Adam Smith merupakan ahli ekonomi yang pertama kali mengemukakan kebijaksanaan *laissez-faire*, dan merupakan ahli ekonomi yang banyak berfokus pada permasalahan pembangunan. Inti dari proses pertumbuhan ekonomi menurut Smith dibagi menjadi dua aspek utama yaitu pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk. Mengenai peranan penduduk dalam pembangunan ekonomi, Smith berpendapat bahwa perkembangan penduduk akan mendorong pembangunan ekonomi. Penduduk yang bertambah pembagian kerja akan mempercepat proses pembangunan ekonomi karena adanya spesialisasi akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mendorong perkembangan teknologi.

2.1.2 Pengangguran

Badan Pusat Statistik mendefinisikan tenaga kerja (*manpower*) sebagai seluruh penduduk dalam usia kerja (15 tahun keatas) yang berpotensi memproduksi barang dan jasa. BPS membagi tenaga kerja (*employed*), yaitu:

- a. Tenaga kerja penuh (*full employed*), adalah tenaga kerja yang mempunyai jumlah jam kerja > 35 jam dalam seminggu dengan hasil kerja tertentu sesuai dengan uraian tugas,
- b. Tenaga kerja tidak penuh atau setengah pengangguran (*under employed*), adalah tenaga kerja dengan jam kerja < 35 jam seminggu, dan
- c. Tenaga kerja yang belum bekerja atau sementara tidak bekerja (*unemployed*), adalah tenaga kerja dengan jam kerja $0 > 1$ jam per minggu.

Menurut undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 8 mengenai perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan meliputi: Kesempatan kerja, Pelatihan kerja, Produktivitas tenaga kerja, Hubungan industrial, Kondisi lingkungan kerja, Pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja. Masalah ketenagakerjaan terus menerus mendapat perhatian dari berbagai pihak, seperti pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat dan keluarga.

Sedangkan menurut pendapat Simanjuntak (2005), bahwa tenaga kerja adalah kelompok penduduk dalam usia kerja, dimana ia mampu bekerja atau melakukan kegiatan ekonomis dalam menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari definisi diatas, mengandung pengertian bahwa tenaga kerja merupakan kelompok orang-orang dari masyarakat yang mampu melakukan kegiatan serta mampu menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Secara fisik, kemampuan diukur dengan usia dengan kata lain orang yang dalam usia kerja singkat disebut sebagai penduduk dalam usia kerja (*working age population*).

Simanjuntak (2005) menjelaskan, tenaga kerja atau *manpower* terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja atau *labor force* terdiri dari (1) golongan yang bekerja, dan (2) golongan yang menganggur dan mencari pekerjaan. Kelompok bukan angkatan kerja terdiri dari (1) golongan yang bersekolah, (2) golongan yang mengurus rumah tangga, dan (3) golongan lain-lain atau penerima pendapatan. Ketiga golongan dalam kelompok bukan angkatan kerja sewaktu-waktu dapat menawarkan jasanya untuk bekerja. Oleh sebab itu, kelompok ini sering juga dinamakan sebagai *potensial labor force*.

Pengangguran merupakan suatu ukuran yang dilakukan jika seseorang tidak memiliki pekerjaan tetapi mereka sedang melakukan usaha secara aktif dalam empat minggu terakhir untuk mencari pekerjaan (Kaufman dan Hotchkiss, 2006). Menurut Sukirno (2011), pengangguran merupakan suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi mereka belum dapat memperoleh pekerjaan tersebut. Pengangguran dapat terjadi disebabkan oleh ketidakseimbangan pada pasar tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja yang ditawarkan melebihi jumlah tenaga kerja yang diminta. Berdasarkan penyebabnya pengangguran dapat dibagi empat kelompok:

a. Pengangguran Normal atau Friksional

Apabila dalam suatu ekonomi terdapat pengangguran sebanyak dua atau tigapersen dari jumlah tenaga kerja maka ekonomi itu sudah dipandang sebagai mencapai kesempatan kerja penuh. Pengangguran sebanyak dua atau tiga persen tersebut dinamakan pengangguran normal atau pengangguran friksional. Para penganggur ini tidak ada pekerjaan bukan karena tidak dapat memperoleh kerja, tetapi karena sedang mencari kerja lain yang lebih baik. Dalam perekonomian yang berkembang pesat, pengangguran adalah rendah dan pekerjaan mudah diperoleh. Sebaliknya pengusaha susah memperoleh pekerja. Akibatnya pengusaha menawarkan gaji yang lebih tinggi. Hal ini akan mendorong para pekerja untuk meninggalkan pekerjaannya yang lama dan mencari pekerjaan baru yang lebih tinggi gajinya atau lebih sesuai dengan keahliannya. Dalam proses

mencari kerja baru ini untuk sementara para pekerja tersebut tergolong sebagai penganggur. Mereka inilah yang digolongkan sebagai pengangguran normal.

b. Pengangguran Siklikal

Perekonomian tidak selalu berkembang dengan teguh. Adakalanya permintaan agregat lebih tinggi, dan ini mendorong pengusaha menaikkan produksi. Lebih banyak pekerja baru digunakan dan pengangguran berkurang. Akan tetapi pada masalah lainnya permintaan agregat menurun dengan banyaknya. Misalnya, di negara-negara produsen bahan mentah pertanian, penurunan ini mungkin disebabkan kemerosotan harga-harga komoditas. Kemunduran ini menimbulkan efek kepada perusahaan-perusahaan lain yang berhubungan, yang juga akan mengalami kemerosotan dalam permintaan terhadap produksinya. Kemerosotan permintaan agregat ini mengakibatkan perusahaan-perusahaan mengurangi pekerja atau menutup perusahaannya, sehingga pengangguran akan bertambah. Pengangguran dengan wujud tersebut dinamakan pengangguran siklikal.

c. Pengangguran Struktural

Tidak semua industri dan perusahaan dalam perekonomian akan terus berkembang maju, sebagiannya akan mengalami kemunduran. Kemerosotan ini ditimbulkan oleh salah satu atau beberapa faktor berikut: wujudnya barang baru yang lebih baik, kemajuan teknologi mengurangi permintaan ke atas barang tersebut, biaya pengeluaran sudah sangat tinggi dan tidak mampu bersaing, dan ekspor produksi industri itu sangat menurun oleh karena persaingan yang lebih serius dari negara-negara lain. Kemerosotan itu akan menyebabkan kegiatan produksi dalam industri tersebut menurun, dan sebagian pekerja terpaksa diberhentikan dan menjadi penganggur. Pengangguran yang wujud digolongkan sebagai pengangguran struktural. Dinamakan demikian karena disebabkan oleh perubahan struktur kegiatan ekonomi.

d. Pengangguran Teknologi

Pengangguran dapat pula ditimbulkan oleh adanya penggantian tenaga manusia oleh mesin-mesin dan bahan kimia. Racun lalang dan rumput misalnya,

telah mengurangi penggunaan tenaga kerja untuk membersihkan perkebunan, sawah.

Pengangguran adalah angka yang menunjukkan berapa banyak dari jumlah angkatan kerja yang sedang aktif mencari pekerjaan. Menurut BPS (2018) bahwa tingkat pengangguran terbuka adalah ukuran yang menunjukkan berapa banyak dari jumlah angkatan kerja yang sedang aktif mencari pekerjaan, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Pengangguran} = \frac{\text{jumlah pencari kerja}}{\text{jumlah angkatan kerja}} \times 100\%$$

Menurut Simanjuntak (2011), di negara yang sedang berkembang, pengangguran dapat digolongkan menjadi 3 jenis yaitu:

a. Pengangguran yang Kelihatan (*Visible Underemployment*)

Pengangguran yang kelihatan akan timbul apabila jumlah waktu kerja yang sungguh-sungguh digunakan lebih sedikit daripada waktu kerja yang sanggup atau disediakan untuk bekerja.

b. Pengangguran Tak Kentara (*Invisible Underemployment*)

Pengangguran tak kentara terjadi apabila para pekerja telah menggunakan waktu kerjanya secara penuh dalam suatu pekerjaan dapat ditarik (setelah ada perubahan-perubahan sederhana dalam organisasi atau metode produksi tetapi tanpa suatu tambahan yang besar) ke sektor atau perusahaan lain tanpa mengurangi output.

c. Pengangguran Potensial

Pengangguran potensial merupakan suatu perluasan daripada disguised unemployment, dalam arti bahwa para pekerja dalam suatu sektor dapat ditarik dari sektor tersebut tanpa mengurangi output, hanya harus dibarengi dengan perubahan-perubahan fundamental dalam metode-metode produksi yang memerlukan pembentukan capital yang berarti.

Berdasarkan cirinya, pengangguran dibagi ke dalam empat kelompok (Sukirno, 2011):

a. Pengangguran Terbuka

Pengangguran ini tercipta sebagai akibat pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja. Sebagai akibatnya dalam perekonomian semakin banyak jumlah tenaga kerja yang tidak dapat memperoleh pekerjaan. Efek dari keadaan ini di dalam suatu jangka masa yang cukup panjang mereka tidak melakukan suatu pekerjaan. Jadi mereka menganggur secara nyata dan separuh waktu, dan oleh karenanya dinamakan pengangguran terbuka.

Pengangguran terbuka dapat pula wujud sebagai akibat dari kegiatan ekonomi yang menurun, dari kemajuan teknologi yang mengurangi penggunaan tenaga kerja, atau sebagai akibat dari kemunduran perkembangan sesuatu industri.

b. Pengangguran Tersembunyi

Pengangguran ini terutama wujud di sektor pertanian atau jasa. Setiap kegiatan ekonomi memerlukan tenaga kerja, dan jumlah tenaga kerja yang digunakan tergantung pada banyak faktor, faktor yang perlu dipertimbangkan adalah besar kecilnya perusahaan, jenis kegiatan perusahaan, mesin yang digunakan (apakah intensif buruh atau intensif modal) dan tingkat produksi yang dicapai. Di banyak negara berkembang seringkali didapati bahwa jumlah pekerja dalam suatu kegiatan ekonomi adalah lebih banyak dari yang sebenarnya diperlukan supaya ia dapat menjalankan kegiatannya dengan efisien. Kelebihan tenaga kerja yang digunakan digolongkan dalam pengangguran tersembunyi. Contoh pengangguran tersembunyi ialah pelayan restoran yang lebih banyak dari yang diperlukan dan keluarga petani dengan anggota keluarga yang besar yang mengerjakan luas tanah yang sangat kecil.

c. Pengangguran Bermusim

Pengangguran ini terutama terdapat di sektor pertanian dan perikanan. Pada musim hujan penyadap karet dan nelayan tidak dapat melakukan pekerjaan mereka dan terpaksa menganggur. Pada musim kemarau pula para petani tidak dapat mengerjakan tanahnya. Di samping itu pada umumnya para petani tidak begitu aktif di antara waktu sesudah menanam dan sesudah menuai. Apabila dalam masa tersebut para penyadap karet, nelayan dan petani tidak melakukan

pekerjaan lain maka mereka terpaksa menganggur. Pengangguran seperti ini digolongkan sebagai pengangguran bermusim.

d. Setengah Menganggur

Pada negara-negara berkembang penghijrahan atau migrasi dari desa ke kota adalah sangat pesat. Sebagai akibatnya tidak semua orang yang pindah ke kota dapat memperoleh pekerjaan dengan mudah. Sebagiannya terpaksa menjadi penganggur sepenuh waktu. Di samping itu ada pula yang tidak menganggur, tetapi tidak pula bekerja sepenuh waktu, dan jam kerja mereka adalah jauh lebih rendah dari yang normal. Mereka mungkin hanya bekerja satu hingga dua hari seminggu, atau satu hingga empat jam sehari. Pekerja-pekerja yang mempunyai masa kerja seperti yang dijelaskan ini digolongkan sebagai setengah menganggur (*underemployed*). Dan jenis penganggurannya dinamakan *underemployment*.

Pengangguran akan muncul dalam suatu perekonomian disebabkan oleh tiga hal (Kaufman dan Hotckiss, 2006) :

a. Proses mencari kerja

Pada proses ini menyediakan penjelasan teoritis yang penting bagi tingkat pengangguran. Munculnya angkatan kerja baru akan menimbulkan persaingan yang ketat pada proses mencari kerja. Dalam proses ini terdapat hambatan dalam mencari kerja yaitu disebabkan karena adanya para pekerja yang ingin pindah kepekerjaan lain, tidak sempurnanya informasi yang diterima pencari kerja mengenai lapangan kerja yang tersedia, serta informasi yang tidak sempurna pada besarnya tingkat upah yang layak mereka terima, dan sebagainya.

b. Kekakuan upah

Besarnya pengangguran yang terjadi dipengaruhi juga oleh tingkat upah yang tidak fleksibel dalam pasar tenaga kerja. Penurunan pada proses produksi dalam perekonomian akan mengakibatkan pergeseran atau penurunan pada permintaan tenaga kerja. Akibatnya, akan terjadi penurunan besarnya upah yang ditetapkan. Dengan adanya kekakuan upah, dalam jangka pendek, tingkat upah akan mengalami kenaikan pada tingkat upah semula. Hal ini akan menimbulkan kelebihan penawaran (*excess supply*) pada tenaga kerja sebagai inflasi dari adanya tingkat pengangguran akibat kekakuan upah yang terjadi.

c. Efisiensi upah

Besarnya pengangguran juga dipengaruhi oleh efisiensi pada teori pengupahan. Efisiensi yang terjadi pada fungsi tingkat upah tersebut terjadi karena semakin tinggi perusahaan membayar upah maka akan semakin keras usaha para pekerja untuk bekerja (walaupun akan muncul juga kondisi dimana terjadi *diminishing rate*). Hal ini justru akan memberikan konsekuensi yang buruk jika perusahaan memilih membayar lebih pada tenaga kerja yang memiliki efisiensi lebih tinggi maka akan terjadi pengangguran terpaksa akibat dari persaingan yang ketat dalam mendapatkan pekerjaan yang diinginkan.

Pada umumnya, pengangguran ini terjadi akibat adanya kekurangan permintaan agregat pada tenaga kerja. Pemilik usaha atau pengusaha menggunakan faktor produksi tenaga kerja menyesuaikan dengan kebutuhannya, artinya saat jumlah produksi atau keuntungan yang didapatkan meningkat maka memerlukan cukup banyak tenaga kerja (Sukirno, 2011).

Ketidaksesuaian antara permintaan dan penawaran tenaga kerja tersebut dapat mempengaruhi keberhasilan atau kelancaran pembangunan perekonomian. Di dalam perekonomian suatu negara atau daerah, keberhasilan dari sektor-sektor pekerjaan dalam menyerap tenaga kerja dapat menghasilkan kehidupan yang layak melalui tingkat upah yang diterima oleh tenaga kerja maupun pendapatan nasional atau daerah total. Artinya, semakin tinggi terserapnya tenaga kerja, maka semakin tinggi upah yang diterima dan pendapatan nasional atau daerah total menjadi meningkat (Sukirno, 2011).

2.1.3 Upah Minimum Provinsi

Menurut Sukirno (2011) upah merupakan imbalan jasa yang diterima seseorang di dalam hubungan kerja yang berupa uang atau barang melalui perjanjian kerja, imbalan jasa, dan diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan bagi diri, dan keluarganya. Dalam teori ekonomi, upah yaitu pembayaran yang diperoleh dari berbagai bentuk jasa yang disediakan, dan diberikan oleh tenaga kerja kepada pengusaha. Perubahan tingkat upah akan mempengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi perusahaan.

Definisi upah pada UU No 13 tahun 2003 pada pasal 1 ayat 30 tentang ketenagakerjaan yang berbunyi upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Menurut UU No. 13 Tahun 2003 Upah Minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Pemenuhan kebutuhan yang layak di setiap propinsi berbeda-beda, maka disebut Upah Minimum Propinsi. Upah Minimum adalah suatu penerimaan bulanan minimum (terendah) sebagai imbalan dari pengusaha kepada karyawan untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan dan dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan atas dasar suatupersetujuan atau peraturan perundang-undangan serta dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan karyawan termasuk tunjangan, baik karyawan itu sendiri maupun untuk keluarganya. Sebagaimana yang telah diatur dalam PP No.8/1981 upah minimum dapat ditetapkan secara minimum regional, sektoral regional maupun subsektoral, meskipun saat ini baru upah minimum regional yang dimiliki oleh setiap daerah.

Keadaan tingkat upah yang terjadi merupakan hasil dari penyerapan tenaga kerja yang ada. Sehingga, agar tidak terjadi keadaan tingkat upah yang tidak sesuai dengan harapan para buruh atau tenaga kerja, diberlakukannya kebijakan upah minimum yang harus dipenuhi oleh pemilik usaha atau pengusaha. Kebijakan ini telah dijelaskan sebelumnya bahwa diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah tentang penetapan upah minimum ini juga disesuaikan dengan keadaan pada daerah tersebut melalui sektor-sektor yang berkembang, serta permintaan dan penawaran tenaga kerja yang terjadi. Pergerakan upah minimum yang naik turun ini tentunya juga dapat

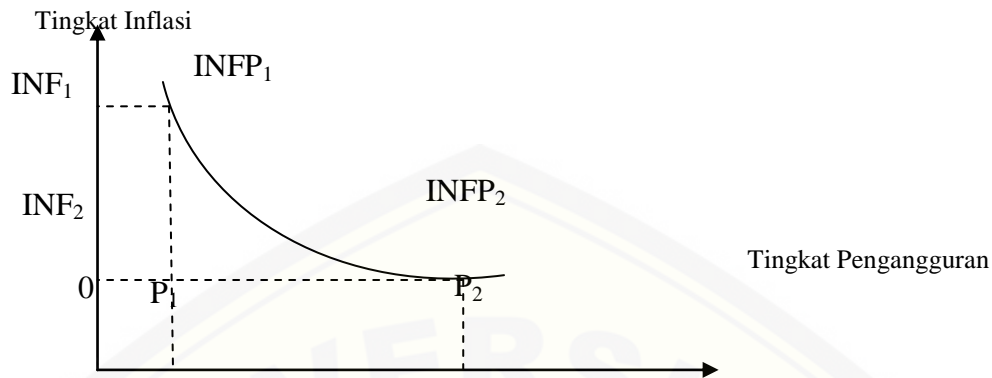
menyebabkan penyerapan tenaga kerja juga berubah, tergantung upah minimum yang ditentukan oleh pemerintah (Sulistiawati, 2012).

2.1.4 Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk menaik secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak disebut dengan inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada (atau mengakibatkan kenaikan) sebagian besar dari harga barang-barang lain (Boediono, 2008). Untuk mengetahui tinggi rendahnya kenaikan harga atau laju kecepatan inflasi itu seringkali digunakan indeks harga. Yang paling banyak digunakan adalah indeks biaya hidup yang sudah mencakup 62 macam barang dan ini sudah diperbaiki lagi menjadi indeks harga konsumen (IHK) yang meliputi 150 macam barang. Untuk meneliti laju inflasi itu biasanya macam barang dikelompokkan lagi menjadi kelompok bahan makan, kelompok sandang, kelompok perumahan dan kelompok lain-lain (Suparmoko, 2006).

Inflasi atau kenaikan harga akan menjadi insentif bagi perusahaan untuk meningkatkan produksinya. Hal ini sesuai dengan hukum penawaran dimana kenaikan harga akan meningkatkan produksi total yang mengindikasikan pertumbuhan ekonomi, sehingga adanya inflasi akan meningkatkan pertumbuhan. Menurut Sukirno (2011) inflasi adalah suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa inflasi disini merupakan suatu proses kenaikan harga dimana kenaikan tersebut berpengaruh didalam suatu perekonomian. Dari hasil pengamatannya A.W Phillips, ternyata ada hubungan yang erat antara Inflasi dengan tingkat pengangguran, jika inflasi tinggi, pengangguran pun akan rendah. Hasil pengamatan Phillips ini dikenal dengan kurva Phillip.

Hubungan antara tingkat inflasi dan pengangguran tersebut digambarkan dalam kurva Phillips pada Gambar 2.1, dimana pada saat tingkat inflasi meningkat maka tingkat pengangguran menjadi menurun ($INFP_1$) dan sebaliknya, pada saat tingkat inflasi menurun maka tingkat pengangguran menjadi meningkat ($INFP_2$).



Gambar 2.1 Kurva *Phillips* (Sumber: Samuelson dan Nordhaus, 2004)

Dengan menggunakan Irving Fisher $MV = PT$, dapat dijelaskan bahwa inflasi timbul karena MV naik lebih cepat daripada T . Oleh karena itu maka untuk mencegah terjadinya inflasi maka salah satu variabel (M atau V) harus dikendalikan. Cara mengatur variabel M, V dan T tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan kebijakan moneter, fiskal atau kebijakan yang menyangkut kenaikan produksi.

1. Kebijakan Moneter

Sasaran kebijakan moneter dicapai melalui pengaturan jumlah uang beredar (M). Salah satu komponen jumlah uang adalah uang giral (*demand deposito*). Uang giral dapat terjadi melalui dua cara pertama apabila seseorang memasukkan uang kas ke bank dalam bentuk giro kemudian yang kedua apabila seseorang memperoleh pinjaman dari bank tidak diterima kas tetapi dalam bentuk giro. Instrumen lain yang dapat dipakai untuk mencegah inflasi adalah politik pasar terbuka (jual/beli surat berharga). Dengan cara menjual surat berharga bank sentral dapat menekan perkembangan jumlah uang beredar sehingga laju inflasi dapat lebih rendah.

2. Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal menyangkut pengaturan tentang pengeluaran pemerintah serta perpajakan yang secara langsung dapat mempengaruhi permintaan total dan dengan demikian akan mempengaruhi harga. Inflasi dapat dicegah melalui penurunan permintaan total. Kebijakan fiskal yang berupa pengurangan

pengeluaran pemerintah serta kenaikan pajak akan dapat mengurangi permintaan total, sehingga inflasi dapat ditekan.

3. Kebijakan yang Berkaitan dengan Output

Kenaikan output dapat memperkecil laju inflasi. Kenaikan jumlah output ini dapat dicapai misalnya dengan kebijaksanaan penurunan bea masuk sehingga impor barang cenderung meningkat. Bertambahnya jumlah barang didalam negeri cenderung menurunkan harga.

4. Kebijakan Penentuan Harga dan Indexing

Ini dilakukan dengan penentuan ceiling harga,serta medasarkan pada indeks harga tertentu untuk gaji ataupun upah (dengan demikian gaji/upah secara riil tetap). Kalau indeks harga naik maka gaji/upah juga dinaikan.

Indeks tentang adanya hubungan antara inflasi dan pengangguran itu relatif baru, kira-kira pada akhir tahun 1950an. Secara sistematis hubungan ini baru mulai diperkenalkan oleh AW Phillips pada tahun 1958 dari hasil studi lapangan tentang hubungan antara kenaikan tingkat upah dengan pengangguran di Inggris pada tahun 1861-1957.

Kurva yang menunjukkan adanya hubungan negatif ini sering disebut kurva Phillips (sesuai dengan nama penemunya). Kurva tersebut sejalan dengan keadaan yang terjadi di Inggris pada periode 1861-1957. Tahun di mana tingkat pengangguran rendah adalah juga tahun dalam mana tingkat kenaikan upah tinggi, dan sebaliknya tahun dalam mana pengangguran tinggi, tingkat kenaikan upah rendah.

2.1.5 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pendapatan regional adalah tingkat besarnya pendapatan masyarakat pada wilayah analisis. Menganalisis suatu region atau membicarakan pembangunan regional tidak mungkin terlepas dari membahas tingkat pendapatan wilayah maupun pendapatan rata-rata masyarakat pada wilayah tersebut. Pembangunan wilayah haruslah bersangkutan paut dengan peningkatan pendapatan masyarakat di wilayah tersebut, yaitu yang dimaksud adalah pendapatan rata-rata (*income per capita*) masyarakat (Tarigan, 2005).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah seluruh nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi yang beroperasi pada suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Atau apabila ditinjau dari segi pendapatan merupakan jumlah dari pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh penduduk di wilayah tersebut yang ikut serta dalam proses produksi dalam jangka waktu tertentu. Hasil perhitungan PDRB disajikan atas PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga pada setiap tahun dan memasukkan nilai inflasi, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar penghitungannya dan tidak memasukkan nilai inflasi (Susanti, 2013).

Produk Domestik Bruto (PDB) diartikan sebagai nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi di dalam wilayah tersebut dalam jangka waktu tertentu (biasanya per tahun). Sedangkan menurut Mankiw (2012), PDB menyatakan pendapatan total dan pengeluaran total nasional atas output barang dan jasa. Dengan tujuannya yaitu meringkas aktivitas ekonomi dalam

Produk domestik daerah adalah semua barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah domestik, tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk daerah tersebut. Sedangkan Produk regional adalah produk domestik ditambah dengan pendapatan yang diterima dari luar daerah dikurang dengan pendapatan yang dibayarkan ke luar daerah tersebut. Jadi produk regional merupakan produk yang ditimbulkan oleh faktor produksi yang dimiliki oleh penduduk suatu daerah (BPS, 2018).

Penghitungan PDRB menggunakan dua macam harga yaitu harga berlaku dan harga konstan. PDRB atas harga berlaku merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun bersangkutan, sementara PDRB atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar dan saat ini menggunakan tahun 2000.

Untuk menghitung angka-angka PDRB ada tiga pendekatan yang dapat digunakan, yaitu: (BPS)

1. Menurut Pendekatan Produksi

PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajian ini dikelompokkan menjadi 9 lapangan usaha (sektor) yaitu :

- 1) Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan
- 2) Pertambangan dan Penggalian
- 3) Industri Pengolahan
- 4) Listrik, Gas dan Air Bersih
- 5) Konstruksi
- 6) Perdagangan, Hotel dan Restoran
- 7) Pengangkutan dan Komunikasi
- 8) Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan
- 9) Jasa-jasa termasuk jasa pelayanan pemerintah. Setiap sektor tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub sektor.

2. Menurut Pendekatan Pendapatan

PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi).

3. Menurut Pendekatan Pengeluaran

PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari :

- 1) Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba
- 2) Pengeluaran konsumsi pemerintah
- 3) Pembentukan modal tetap domestik bruto
- 4) Perubahan inventori, dan

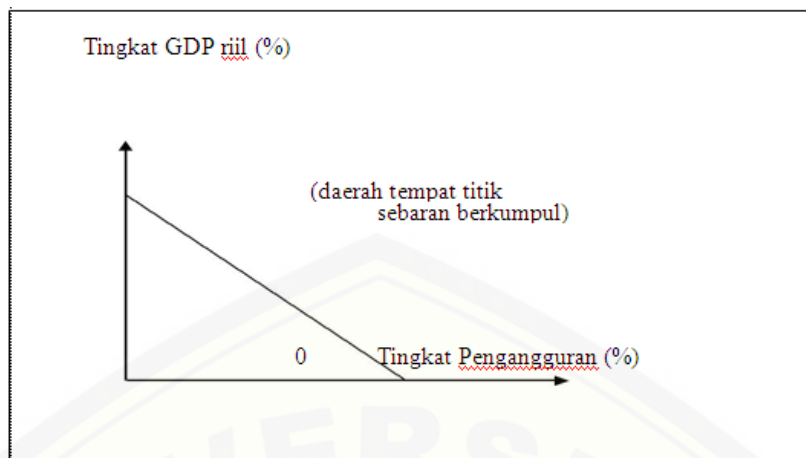
5) Ekspor neto (ekspor neto merupakan ekspor dikurangi impor).

Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak tak langsung neto

Penyajian PDRB atas dasar harga berlaku, semua agregat pendapatan dinilai atas dasar harga yang berlaku pada masing-masing tahunnya, baik pada saat menilai produksi dan biaya antara maupun pada penilaian komponen PDRB. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan suatu daerah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.

HUKUM OKUN

Arthur Okun (1929-1979), adalah ekonom yang membuat kebijakan perekonomian atau membuat konsep yang menyatakan bahwa adanya hubungan antara output didapatkan dan jumlah pengangguran yang bergerak seiring dengan jalannya keadaan perekonomian. Dalam konsepnya tersebut, menghasilkan keadaan bahwa terdapat hubungan yang negatif atau terbalik antara tingkat pengangguran dengan GDP, yang dikenal dengan hukum Okun (Darman, 2013). Hukum Okun memaparkan bahwa setiap penurunan GDP maka akan menyebabkan kenaikan tingkat pengangguran. Begitu juga sebaliknya, saat terjadi kenaikan GDP maka akan menyebabkan penurunan tingkat pengangguran (Samuelson dan Nordhaus, 2007). Hubungan antara tingkat GDP dan pengangguran tersebut digambarkan dalam kurva Okun pada Gambar 2.2, dimana beberapa titik berkumpul pada daerah sebaran, sehingga dapat ditarik garis yang menghubungkan persentase antara GDP riil dengan pengangguran.



Gambar 2.2 Kurva *Okun* (Sumber: Samuelson dan Nordhaus, 2007)

Terkait dengan tingkat pertumbuhan GDP secara nasional ini sama halnya dengan pertumbuhan di daerah yang biasa disebut dengan PDRB. Hasil pembangunan ekonomi yang berhasil tersebut dibuktikan dengan pendapatan total yang diterima, yaitu dalam lingkup daerah adalah PDRB. Ketidakmerataan atau tidak seimbangannya penggunaan tenaga kerja ini menyebabkan perbedaan dalam terserapnya tenaga kerja, sehingga timbul masalah dalam penggunaan tenaga kerja, yaitu pengangguran (Supartoyo dkk, 2013).

2.2 Penelitian Terdahulu

Studi mengenai pengaruh upah minimum, inflasi dan PDRB terhadap tingkat pengangguran telah banyak dilakukan oleh banyak peneliti. Setelah sebelumnya dijabarkan mengenai hubungan teoritis terkait masalah yang akan diteliti. Berikut rincian mengenai penelitian-penelitian sejenis sebelumnya yang dijadikan referensi dalam penelitian ini.

1. Tengko Sarimuda dan Soekarnoto (2014) melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh PDRB, UMK, Inflasi, dan Investasi Terhadap Pengangguran Terbuka Di Kab/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2007-2011. Studi ini bertujuan untuk menguji pengaruh PDRB, UMK, Inflasi, dan Investasi terhadap Pengangguran Terbuka di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur. Populasi penelitian terdiri atas 29 Kabupaten dan 9 Kota, menggunakan data sekunder selama kurun waktu tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS)

Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur, dan Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur. Analisis data menggunakan regresi data panel dengan paket program Eviews 7. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan PDRB, UMK, Inflasi, dan Investasi, berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di kabupaten/kota provinsi Jawa Timur tahun 2007-2011. Sementara secara parsial, PDRB dan UMK berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di kabupaten/kota provinsi Jawa Timur tahun 2007-2011. Sedangkan Inflasi dan Investasi tidak berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di kabupaten/kota provinsi Jawa Timur tahun 2007-2011.

2. Muhammad Shun Hajji dan Nugroho SBM (2013) melakukan penelitian dengan judul Analisis PDRB, Inflasi, Upah Minimum Provinsi, dan Angka Melek Huruf Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1990-2011. Hasil penelitian ini juga menunjukkan beberapa faktor yang mempengaruhi TPT. Dari empat faktor yang diteliti (PDRB, Inflasi, UMP dan AMH), terbukti bahwa UMP dan AMH berpengaruh positif dan signifikan terhadap TPT. Hal ini dapat dimengerti mengingat tingkat upah yang ditetapkan pemerintah di atas keseimbangan pasar dirasa sangat membebani perusahaan dalam biaya produksinya, dan kualitas pendidikan yang tinggi membuat masyarakat Jawa Tengah enggan bekerja pada tingkat upah yang mereka rasa kurang sesuai dengan pengorbanan yang dikeluarkan dalam proses menempuh pendidikan.

3. Titis Sudhani Putri (2017) melakukan penelitian yang berjudul Analisis Pengaruh Inflasi, Investasi, Upah Minimum dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran Di Ekskarisidenan Surakarta Periode Tahun 2010-2014. Variable yang digunakan dalam penelitian ini adalah PDRB, investasi, UMK dan inflasi. Sedangkan metode yang digunakan yaitu *Pooled Least Square* (PLS). Hasil penelitian ini yaitu Pengujian menggunakan uji chow menunjukkan bahwa model PLS lebih tepat digunakan daripada model FEM. Selanjutnya, pengujian yang dilakukan dengan uji husman menunjukkan model REM lebih tepat digunakan daripada model FEM. Untuk memilih antara model REM dan PLS maka

digunakan uji Breusch Pagan Lagrange Multiplier Test dan hasilnya menunjukkan bahwa model PLS adalah model yang terbaik dilakukan dalam penelitian ini. Berdasarkan uji validitas pengaruh (uji t) pada signifikansi (α) sebesar 0,05 atau 5 persen menyatakan bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran, Investasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pengangguran, UMK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran, Inflasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengangguran di Ekskarisidenan Surakarta tahun 2010-2014. Sednagkan uji F menunjukan pengaruh bersama-sama terhadap variable terikat.

4. Warda Harahap & Nasri Bachtiar (2016) melakukan penelitian yang berjudul Analisis Pengaruh Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi Dan Upah Terhadap Pengangguran Terdidik di Indonesia. Variable yang digunakan adalah inflasi, PDRB dan upah, dengan menggunakan metode *Fixed Effect Model* (FEM). Hasil penelitian ini yaitu Nilai R² dalam penelitian ini adalah 0.910731, yang berarti bahwa 91,07 persen variabel-variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen dalam model. Sedangkan sisanya sebesar 8,93 persen dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model. Variabel inflasi memiliki hubungan positif dengan pengangguran terdidik dan memiliki nilai koefisien sebesar 0.044758 dengan tingkat taraf nyata 1 persen. Selanjutnya, variabel pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan negatif dengan pengangguran terdidik dan memiliki nilai koefisien sebesar -1.478125. Dan variable lupah memiliki hubungan negatif dengan pengangguran terdidik dan memiliki nilai koefisien sebesar -3.640634.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

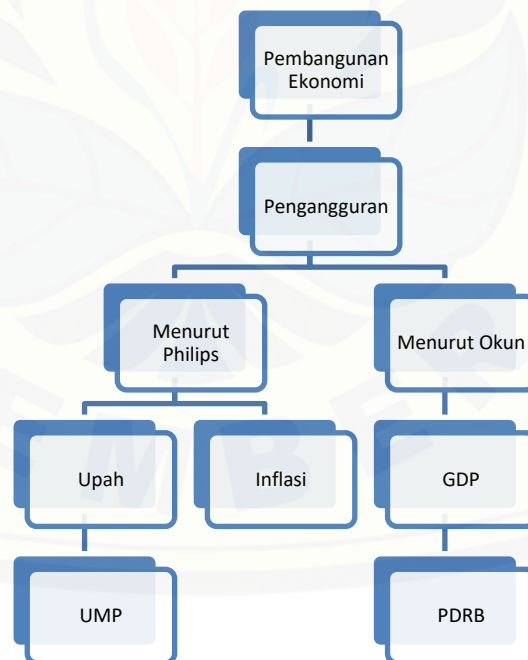
No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel dan Metode Analisis	Hasil
1.	Tengko Sarimuda dan Soekarnoto (2014).	Pengaruh UMK, Inflasi, dan Investasi Terhadap Pengangguran Terbuka Di Kab/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 – 2011	Variabel: PDRB, UMK, inflasi, dan investasi Metode: Regresi Data Panel	Secara simultan PDRB, UMK, Inflasi, dan Investasi berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di kabupaten/kota provinsi Jawa Timur tahun 2007-2011. Sementara secara parsial, PDRB dan UMK berpengaruh signifikan terhadap Pengangguran Terbuka di kabupaten /kota provinsi Jawa Timur tahun 2007-2011. Sedangkan Inflasi dan Investasi tidak berpengaruh terhadap Pengangguran Terbuka di kabupaten/kota provinsi Jawa Timur tahun 2007-2011.
2.	Muhammad Shun Hajji dan Nugroho SBM (2013).	Analisis Inflasi, Minimum Huruf Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1990-2011	Variabel: PDRB, Upah provinsi, dan angka melek huruf Metode: <i>Ordinary Least Square</i> (OLS)	Uji F menunjukkan pengaruh serempak terhadap variable terikat. Dari empat faktor yang diteliti (PDRB, Inflasi, UMP dan AMH), terbukti bahwa UMP dan AMH berpengaruh positif dan signifikan terhadap TPT. PDRB dan Inflasi berpengaruh negatif.

3. Titis Sudhani Putri (2017). Analisis Pengaruh Variabel: PDRB, Inflasi, Investasi, UMK dan Upah Minimum dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran Di Ekskarisidenan Surakarta Periode Tahun 2010-2014. Metode: *Pooled Least Square* (PLS). Pengaruh (uji t) pada signifikansi (α) sebesar 0,05 atau 5 persen menyatakan bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran, Investasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pengangguran, UMK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran, Inflasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengangguran di Ekskarisidenan Surakarta tahun 2010-2014. Sednagkan uji F menunjukkan pengaruh bersama-sama terhadap variable terikat.
4. Warda Harahap & Nasri Bachtiar (2016). Analisis Pengaruh Variabel: inflasi, Inflasi, Pertumbuhan PDRB, dan upah. Metode: *Fixed Effect Model* (FEM). Variabel inflasi memiliki hubungan positif dengan pengangguran terdidik dan memiliki nilai koefisien sebesar 0.044758 dengan tingkat taraf nyata 1 persen. Selanjutnya, variabel pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan negative dengan pengangguran terdidik dan memiliki nilai koefisien sebesar -1.478125. Dan variable lupah memiliki hubungan negative dengan pengangguran terdidik dan memiliki nilai koefisien sebesar -3.640634
-

2.3 Kerangka Konseptual

Penelitian ini berfokus untuk mengetahui pengaruh variabel UMP, Inflasi dan PDRB terhadap tingkat pengangguran di Pulau Jawa pada periode 2010 -2017. Setiap variabel yang digunakan berasal dari teori, serta hubungan sebab akibat sehingga menjadi suatu alur yang terkait dengan variabel tujuan yaitu tingkat pengangguran.

Keberhasilan pembangunan ekonomi salah satunya bisa dilihat dari pengangguran yang ada di suatu daerah tersebut. Phillips mengatakan bahwa terdapat keterkaitan antara perubahan tingkat upah dengan tingkat pengangguran yang terjadi. Dalam hal ini UMP. Phillips juga menjelaskan terdapat keterkaitan antara perubahan inflasi dengan tingkat pengangguran. Kedua hal tersebut dipaparkan dalam Kurva Phillips. Disamping itu Arthur Okun juga mengatakan bahwa terdapat keterkaitan antara perubahan DGP dengan tingkat pengangguran. Dalam hal ini PDRB (karena pendapatan daerah). Maka dari itu penelitian ini berfokus pada tiga variabel bebas, yaitu UMP, Inflasi dan PDRB.

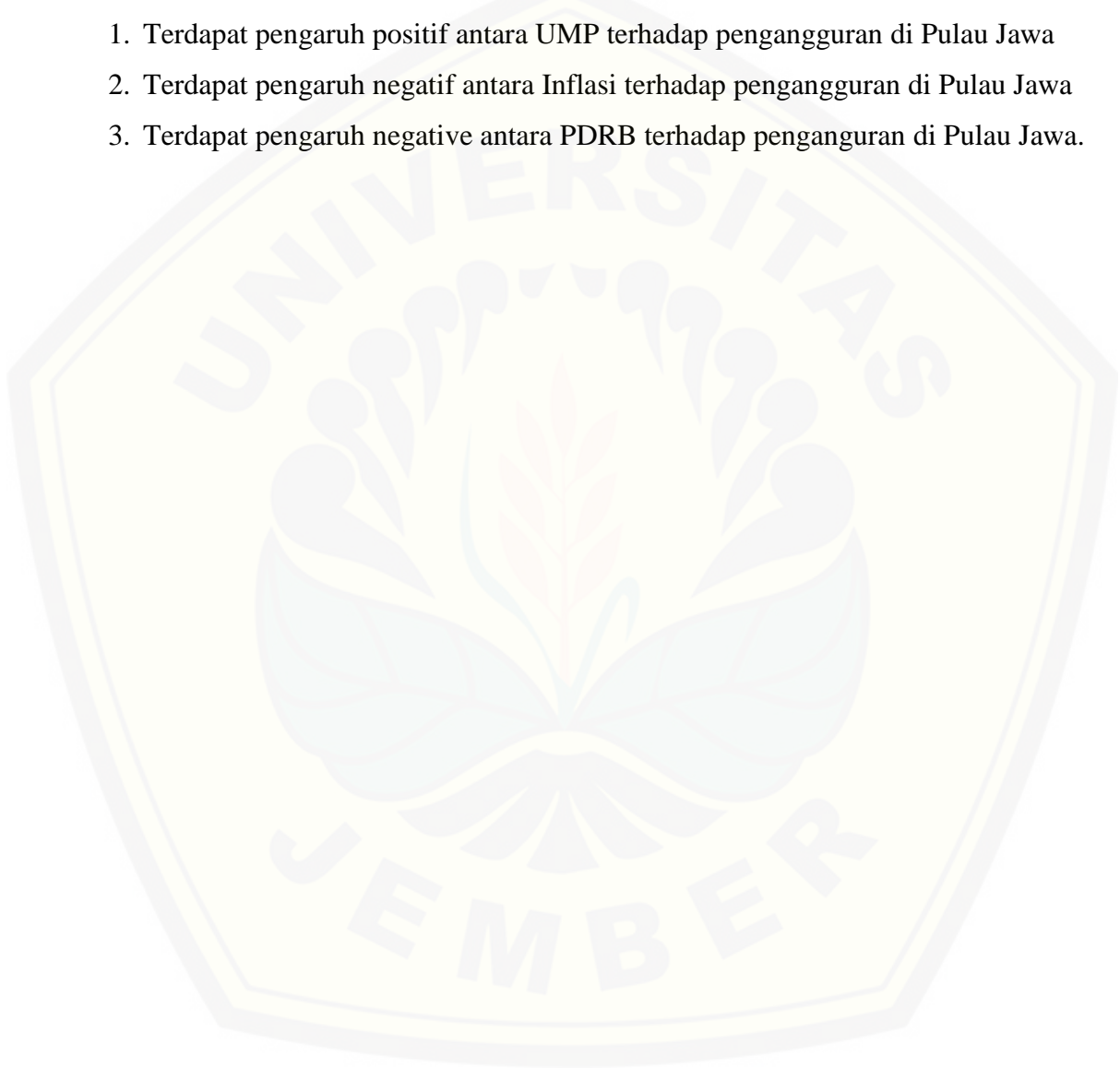


Gambar 2.3 Kerangka Konseptual

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah suatu pernyataan yang bersifat sementara atau suatu dugaan, anggapan, pendapat atau asumsi yang mungkin benar atau salah, yang masih harus dibuktikan kebenarannya. Berdasarkan landasan teori dan penelitian sebelumnya, maka perumusan hipotesis ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh positif antara UMP terhadap pengangguran di Pulau Jawa
2. Terdapat pengaruh negatif antara Inflasi terhadap pengangguran di Pulau Jawa
3. Terdapat pengaruh negative antara PDRB terhadap pengangguran di Pulau Jawa.



BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian eksplanasi (*explanatory research*) yaitu penelitian yang digunakan bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara dua variabel atau lebih dan bisa juga digunakan untuk mengetahui sifat dari hubungan antara dua variabel atau lebih tersebut. Jenis penelitian ini bertujuan untuk menguji dari kebenaran hipotesis yang diberikan hasil penelitian (Mulyadi, 2011). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah pengangguran dan variabel bebas dalam penelitian ini terdiri dari upah minimum provinsi, inflasi dan PDRB.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk data panel yaitu gabungan dari data *time series* (periode 2010-2015) dan data *cross section* (6 Provinsi Pulau Jawa). Penelitian ini menggunakan jangka waktu selama tahun 2010-2015 atau selama 6 tahun. Objek penelitian adalah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Data yang digunakan dalam penelitian diambil dari beberapa sumber, diantaranya Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, BPS DKI Jakarta, BPS Jawa Barat, BPS Banten, BPS DI Yogyakarta, BPS Jawa Tengah, BPS Jawa Timur, *Statistic Yearbook of Indonesia*, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

3.3 Spesifikasi Model Penelitian

Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil dari rujukan-rujukan penelitian yang sudah ada sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini. Model penelitian tersebut yaitu:

$$\text{Pengangguran} = \alpha + b_1\text{UMP} + b_2\text{Inflasi} + b_3\text{PDRB} + e \dots \dots \dots (1)$$

Atau

$$Y = \alpha + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e \dots \dots \dots (2)$$

dimana:

Y = Pengangguran

α = Konstanta

b_1, b_2, b_3 = Koefisien regresi

X_1 = Upah Minimum Provinsi

X_2 = Inflasi

X_3 = Produk Domestik Regional Bruto

e = *Error term*

3.4 Metode Analisis Regresi Data Panel

Analisis dalam regresi adalah suatu alat yang digunakan untuk pengujian dari data-data. Menurut Pangestika (2015), variabel yang digunakan variabel penyebab biasanya disebut dengan variabel penjelas atau *independent*, dan terdapat variabel akibat biasanya disebut dengan variabel terikat atau *dependent*.

Menurut Supranto (2004), data panel yaitu data gabungan dari runtut waktu (*time series*) dan data silang (*cross section*). Data runtut waktu adalah urutan beberapa objek (harian, bulanan, atau tahunan). Data silang adalah data dari satu atau beberapa objek, berupa angka atau persentase. Pada penelitian ini menggunakan data objek atau *cross section* dengan N sebanyak 6 provinsi yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, DI Yogyakarta dan Jawa Timur, sedangkan data *time series* dengan T selama tahun 2006-2015, sehingga data ini merupakan jenis data *balance panel* dan jenis *long panel*.

Terdapat beberapa pendekatan dalam menduga model dari data panel yaitu sebagai berikut:

3.4.1 Common Effect

Model *common effect* adalah model pendekatan penyatuan antara data *time series* dengan *cross section*, diasumsikan setiap kemunculan perubahan diakibatkan variabel pengganggu saja (Nachrowi dan Usman, 2006). Penaksiran model *common effect* adalah *Pooled Least Square* (PLS). Persamaan modelnya:

$$Y_{i,t} = x_{i,t} b_{i,t} + e_{i,t} \dots \dots \dots (3)$$

3.4.2 Fixed Effect

Model *fixed effect* adalah model pendekatan penyatuan antara data *time series* dengan *cross section*, diasumsikan setiap kemunculan perubahan diakibatkan variabel pengganggu saja (Nachrowi dan Usman, 2006). Penaksiran model *fixed effect* adalah *Least Square Dummy Variable* (LSDV). Persamaan modelnya:

$$Y_{i,t} = x_{i,t}b_{i,t} + v_i + e_{i,t} \dots \dots \dots (4)$$

3.4.3 Random Effect

Model *random effect* model pendekatan penyatuan antara data *time series* dengan *cross section*, diasumsikan efek rata-rata dari data *cross section* dan *time series* dipresentasikan dalam *intercept* (Nachrowi dan Usman, 2006). Penaksiran model *random effect* adalah *General Least Square* (GLS). Persamaan modelnya:

$$Y_{i,t} = x_{i,t}b_{i,t} + w_i + e_{i,t} \dots \dots \dots (5)$$

dimana:

e_i : komponen *error cross section*

v_i : komponen *error time series*

w_{it} :komponen *error gabungan*

3.5 Pemilihan Model Pengolahan Data

Dalam estimasi model regresi panel, dilakukan beberapa uji untuk memilih metode pendekatan estimasi yang sesuai. Langkah-langkah yang dilakukan dalam mendapatkan model yang tepat adalah sebagai berikut:

3.5.1 Chow Test

Uji ini untuk memilih model antara (*common effect*) dengan (*fixed effect*)(Pangestika, 2015). Pengujian hipotesis sebagai berikut:

- (1) H_0 :corratau korelasi $(X_{it}, U_{it}) = 0$ (*common effect*), artinya *common effect* lebih tepat daripada *fixed effect*.
- (2) H_1 :corratau korelasi $(X_{it}, U_{it}) \neq 0$ (*fixed effect*), artinya *fixed effect* lebih tepat daripada *common effect*.

Rumus uji statistiknya:

$$x^2_{df} = \frac{(b_{CEM} - b_{FEM})^2}{\sigma_{CEM-FEM}} \dots\dots\dots (6)$$

dimana:

b = koefisien *common effect*

β = koefisien *fixed effect*

k = jumlah variabel penjelas

Statistik *chow test* mengikuti sebaran *chi-square* yaitu x^2 . Sehingga untuk menentukannya adalah saat nilai $x^2 > x^2(k, a)$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, sehingga efek dari *cross – sectional* atau hasil dari penelitian beberapa obyek berhubungan dengan regresor lain tersebut menggunakan model *fixed effect*. Sebaliknya apabila, $x^2 < x^2(k, a)$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, sehingga efek dari *cross-sectional* atau hasil dari penelitian beberapa obyek berhubungan dengan regresor lain tersebut menggunakan model *common effect*.

3.5.2 Hausman Test

Uji ini untuk memilih model antara (*fixed effect*) dengan (*random effect*) (Pangestika, 2015). Pengujian hipotesis sebagai berikut:

(1) H_0 : *corr* atau korelasi (X_{it}, U_{it}) = 0 (*random effect*), artinya *random effect* lebih tepat daripada *fixed effect*.

(3) H_1 : *corr* atau korelasi (X_{it}, U_{it}) \neq 0 (*fixed effect*), artinya *fixed effect* lebih tepat daripada *random effect*.

Adapun rumus uji statistiknya adalah sebagai berikut:

$$x^2_{df} = \frac{(b_{REM} - b_{FEM})^2}{\sigma_{REM-FEM}} \dots\dots\dots (7)$$

dimana:

b = koefisien *random effect*

β = koefisien *fixed effect*

k = jumlah variabel penjelas

Statistik *hausman test* mengikuti sebaran *chi-square* yaitu x^2 . Sehingga untuk menentukannya adalah dengan saat nilai $x^2 > x^2(k, a)$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, sehingga efek dari *cross – sectional* atau hasil dari penelitian beberapa obyek berhubungan dengan regresor lain tersebut menggunakan model *fixed effect*. Sebaliknya apabila, $x^2 < x^2(k, a)$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak,

sehingga efek dari *cross-sectional* atau hasil dari penelitian beberapa obyek berhubungan dengan regresor lain tersebut menggunakan model *random effect*.

3.6 Uji Statistik

Pengujian statistik ini untuk mengetahui koefisien regresi yang didapatkan dengan memeriksa atau mengujinya. Signifikan adalah suatu koefisien regresi yang tidaklah sama dengan nol. Jika koefisien yang didapatkan adalah sama dengan nol, maka tidak didapatkan cukup bukti bahwa variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen (Nachrowi dan Usman, 2006).

3.6.1 Uji Serentak (Uji F)

Uji signifikansi ini pada dasarnya dimaksudkan untuk membuktikan secara statistik bahwa seluruh variabel independen yaitu UMP, PDRB dan Inflasi berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen yaitu pengangguran. Uji F digunakan untuk menunjukkan apakah keseluruhan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen dengan menggunakan *level of significance* 5 persen. Dalam mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama, menggunakan uji F dengan membuat hipotesis sebagai berikut:

- (1) $H_0: b_1 = b_2 = b_3 = 0$, artinya UMP, inflasi dan PDRB berpengaruh secara bersama-sama (signifikan) terhadap variabel dependen yaitu pengangguran secara simultan.
- (2) $H_1: b_1 \neq b_2 \neq b_3 \neq 0$, artinya UMP, inflasi dan PDRB tidak berpengaruh secara bersama-sama (tidak signifikan) terhadap variabel dependen yaitu pengangguran secara simultan.

Rumus uji F adalah sebagai berikut:

$$F \text{ hitung} = \frac{R^2/(n+k-1)}{(1-R^2)/(n.t-n-k)} \dots \dots \dots (8)$$

dimana:

- R^2 = koefisien determinasi
 t = jumlah unit *time series*
 n = jumlah unit *cross section*

k = jumlah variable independen

Apabila nilai F hitung $>$ F tabel maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, maka ada pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Sebaliknya, F hitung $<$ F tabel maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, maka tidak ada pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Nachrowi dan Usman, 2006).

3.6.2 Uji Parsial (Uji t)

Uji signifikansi ini digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Dengan kata lain, untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen dapat menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel dependen secara nyata (Gujarati dan Porter, 2010). Untuk mengkaji pengaruh variabel independen terhadap dependen secara individu dapat dilihat hipotesis berikut:

(1) $H_0 : b_1 = 0$, yaitu tidak ada pengaruh signifikan UMP terhadap Pengangguran di Pulau Jawa.

$H_1 : b_1 > 0$, yaitu terdapat pengaruh signifikan UMP terhadap Pengangguran di Pulau Jawa

(2) $H_0 : b_2 = 0$, yaitu tidak ada pengaruh signifikan inflasi terhadap Pengangguran di Pulau Jawa

$H_1 : b_2 > 0$, yaitu terdapat pengaruh signifikan inflasi terhadap Pengangguran di Pulau Jawa.

(3) $H_0 : b_3 = 0$, yaitu tidak ada pengaruh signifikan PDRB terhadap Pengangguran di Pulau Jawa.

$H_1 : b_3 > 0$, yaitu terdapat pengaruh signifikan PDRB terhadap Pengangguran di Pulau Jawa.

Rumus uji t adalah sebagai berikut:

$$t = \frac{b_j - b_j}{s.e (b_j)} \dots \dots \dots (9)$$

dimana:

t = pengujian secara parsial

b_i = koefisien regresi

e = standart error atau taksiran kesalahan

3.6.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen yaitu UMP, Inflasi dan PDRB terhadap variabel dependen pengangguran maka digunakan analisis koefisien determinasi (R^2). Koefisien Determinasi (R^2) mendekati nol berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen terbatas. Nilai R^2 mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen (Nachrowi dan Usman, 2006). Rumus uji R^2 adalah sebagai berikut:

$$R^2 = \frac{ESS}{TSS} \dots \dots \dots (10)$$

dimana:

R^2 = koefisien determinasi berganda

ESS = jumlah kuadrat yang dijelaskan

RSS = jumlah kuadrat residual

TSS = Jumlah kuadrat total

Kriteria pengujian:

1. Nilai R^2 hampir mendekati 0, artinya kemampuan variabel bebas menjelaskan variabel terikat sangat rendah.
2. Nilai R^2 hampir mendekati 1, artinya kemampuan variabel bebas menjelaskan variabel terikat sangat tinggi.

3.7 Uji Asumsi Klasik

3.7.1 Uji Normalitas

Uji normalitas untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Hipotesis pengujian ini:

- (1) H_0 diterima, maka berdistribusi normal
- (2) H_a diterima, maka berdistribusi tidak normal.

Uji Jarque Bera (J-B) mempunyai distribusi chi-kuadrat dengan derajat bebas dua (X^2_2). Apabila J-B hitung < nilai χ^2 (Chi-Square), maka H_0 diterima dan H_a ditolak yaitu nilai residual terdistribusi normal (Gujarati dan Porter, 2010).

3.7.2 Uji Multikolinearitas

Pengujian ini untuk mengetahui apakah antar variabel bebas dalam persamaan regresi tersebut tidak saling berkorelasi. Indikator dalam mendeteksi adanya multikolinearitas, diantaranya (Nachrowi dan Usman, 2006):

- a. Nilai (lebih dari 0,8) tetapi tidak ada atau sedikit statistik yang signifikan; dan
- b. Nilai F-statistik signifikan, namun t-statistik masing-masing variabel bebas tidak signifikan.

Sehingga kriteria multikolinearitas adalah nilai korelasinya lebih dari 0,8.

3.7.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi untuk menguji model regresi linear ada atau tidaknya korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$. Jika terjadi korelasi, maka ada problem autokorelasi. Pengujian asumsi menggunakan statistik uji *Durbin Watson statistics* (*DW statistics*) yaitu membandingkan hasil uji Durbin Watson dengan tabel pengujian *Durbin Watson* (Mulyono, 2009). Tabel *Durbin Watson* dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Tabel Pengujian *Durbin Watson*

Adanya Autokorelasi Positif	Tidak Tahu	Tidak Ada Autokorelasi	Tidak Tahu	Adanya Autokorelasi Negatif	
0	dL	dU	2 - 4-dU	4-dL	4

Sumber: Mulyono (2009).

Kriteria keputusan dari pengujian uji statistik *Durbin Watson* dengan tabel *Durbin Watson* dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Kriteria Keputusan Pengujian *Durbin Watson*

Kriteria	Hipotesis
$DW < D_L$	Ada gejala autokorelasi positif
$d_L \leq DW \leq D_U$	Tidak dapat mengambil kesimpulan
$d_U \leq DW \leq 4 - D_U$	Tidak ada gejala autokorelasi
$4 - d_U \leq DW \leq 4 - d_L$	Tidak dapat mengambil kesimpulan
$DW > 4 - d_L$	Ada gejala autokorelasi positif

Sumber: Mulyono (2009).

Proses uji autokorelasi dapat dilihat standar nilai DW yang berada di sekitar angka 2. Jika nilai statistik DW bernilai sekitar angka 2, maka model tersebut terbebas dari autokorelasi.

3.7.4 Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas untuk menguji model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain atau untuk melihat penyebaran data. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut homokedastisitas, jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini, uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji *Park*. Hipotesis yang digunakan dalam uji *Park* adalah:

- (1) H_0 diterima, maka tidak ada heteroskedastisitas
- (2) H_a diterima, maka ada heteroskedastisitas

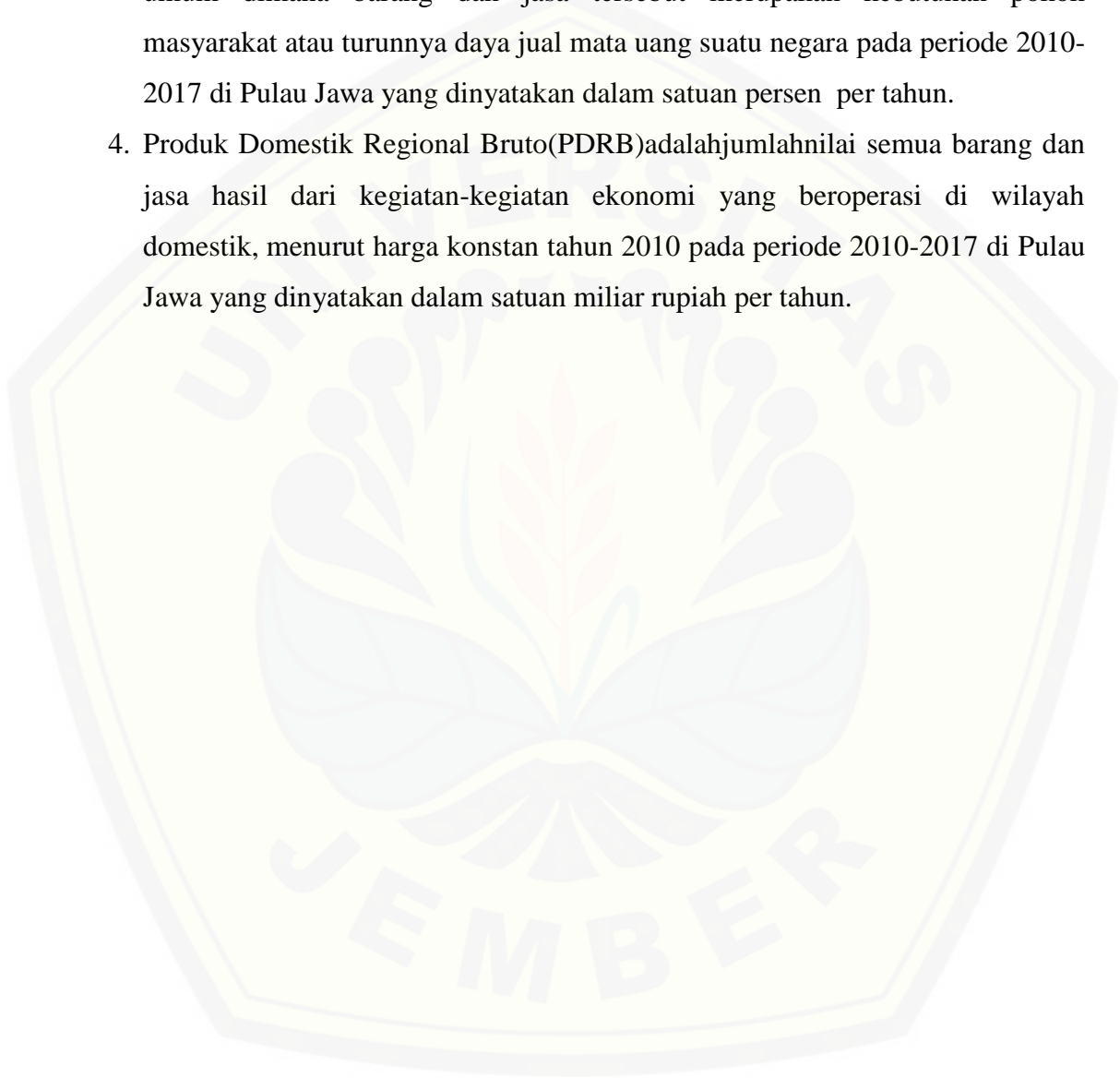
Dalam uji *Park* ini, nilai probabilitas masing-masing variabel bebas $> \alpha = 0.05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak, maka model yang digunakan tidak terdapat gejala heteroskedastisitas (Ghozali, 2013).

3.8 Definisi Variabel Operasional

Pada penelitian ini terdiri dari satu variabel terikat dan tiga variabel bebas, dimana variabel terikat dari penelitian ini adalah pengangguran. Sedangkan variabel bebas adalah UMP, Inflasi dan PDRB. Definisi operasional dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pengangguran adalah banyaknya jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja dan aktif mencari pekerjaan pada periode 2010-2017 di Pulau Jawa yang dinyatakan dalam satuan jiwa per tahun.

2. Upah Minimum Provinsi (UMP) adalah upah minimum yang berlaku untuk seluruh Kabupaten/Kota di satu provinsi pada periode 2010-2017 di Pulau Jawa yang dinyatakan dalam satuan Rupiah per tahun.
3. Inflasi adalah laju pertumbuhan dari kenaikan harga barang dan jasa secara umum dimana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat atau turunnya daya jual mata uang suatu negara pada periode 2010-2017 di Pulau Jawa yang dinyatakan dalam satuan persen per tahun.
4. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai semua barang dan jasa hasil dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah domestik, menurut harga konstan tahun 2010 pada periode 2010-2017 di Pulau Jawa yang dinyatakan dalam satuan miliar rupiah per tahun.



BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan penelitian terdapat UMP, Inflasi, dan PDRB terhadap pengangguran di Pulau Jawa, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. UMP berpengaruh signifikan dan memiliki koefisien positif terhadap pengangguran di Pulau Jawa. Artinya apabila UMP naik maka akan meningkatkan pengangguran di Pulau Jawa.
2. Inflasi berpengaruh signifikan dan memiliki koefisien negatif terhadap pengangguran di Pulau Jawa. Artinya apabila Inflasi meningkat akan mengurangi terhadap pengangguran di Pulau Jawa
3. PDRB berpengaruh signifikan dan memiliki koefisien negatif terhadap pengangguran di Pulau Jawa. Artinya apabila PDRB meningkat akan mengurangi pengangguran di Pulau Jawa

5.2 Saran

Saran yang diperoleh dari hasil penelitian pengaruh UMP, Inflasi dan PDRB di Pulau Jawa ini adalah sebagai berikut :

1. Perlu nya pemerataan upah minimum di setiap provinsi, misalnya dengan meningkatkan daya beli masyarakat, kemampuan perusahaan di daerah, dan lain-lain.
2. Perlu nya kebijakan yang berkaitan dengan suku bunga yang bertujuan untuk mendorong masyarakat untuk menabung. Sehingga jumlah uang yang beredar dapat berkurang dan inflasi dapat ditekan.
3. Perlu nya hal-hal yang berkaitan dengan penambahan kewirausahaan, karena wirausaha akan dapat menciptakan lapangan pekerjaan, memanfaatkan dan memobilisasi sumber daya untuk meningkatkan produktivitas nasional baik sektor formal maupun informal yang dapat membantu penyerapan tenaga kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, L. 2010. *Ekonomi Pembangunan Edisi 5*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu YKPN.
- Badan Pusat Statistik. 2018. *Statistika Indonesia 2018*. Jakarta: Katalog BPS.
- Boediono, 2008. *Pengantar Ilmu Ekonomi No. 2*. Penerbit : BPFE UGM.
- Boediono, 2013. *Pengantar Ilmu Ekonomi No. 2*. Penerbit : BPFE UGM.
- Ghozali, I. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, Damodar. N dan Porter, Dawn C. 2010. *Dasar-dasar Ekonometrika Edisi Kelima*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hajji, Muhammad. S dan Nugroho, SBM. 2013. Analisis PDRB, Inflasi, Upah Minimum Provinsi, dan Angka Melek Huruf Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1990-2011. *Jurnal Ekonomi*. 2 (3): 1-9.
- Harahap, W dan Nasri, B. 2016. Analisis Pengaruh Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Terhadap Pengangguran Terdidik Indonesia. *Jurnal Ekonomi*. 2 (1): 2-8.
- Jhingan, M. L. (2010). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mankiw, N. Gregory. 2012. *Pengantar Ekonomi Makro Edisi Kesebelas*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mulyadi, M. 2011. Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*. 3 (2): 2-8.
- Mulyono. 2009. *Anomali Pergantian-Metodologi Penelitian*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Nachrowi, Djalal. N dan Hardius, U. 2006. *Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*. Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI.

- Pangestika, S. 2015. Analisis Estimasi Model Regresi Data Panel Dengan Pendekatan Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), Dan Random Effect Model (REM). *Skripsi*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Prasanti, T. A, Triastuti, W dan Agus, R. 2015. Aplikasi Regresi Data Panel Untuk Pemodelan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Gaussian*. 4 (3): 687-696
- Putri, T. S. 2017. Analisis Pengaruh Inflasi, Investasi, Upah Minimum dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran di Ekskarisidenan Surakarta Periode Tahun 2010-2014. *Skripsi*. Surakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Samuelson, P. A dan Nordhaus, W. D. 2007. *Ilmu Makro Ekonomi*. Jakarta: PT. Media Global Edukasi.
- Sarimuda, T. dan Soekarnoto. 2014. Pengaruh PDRB, UMK, Inflasi dan Pengangguran Terbuka di Kab/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2007-2011. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. XXIV (2): 8-15.
- Simanjuntak, Payaman J. 2011. *Manajemen dan Evaluasi Kinerja (Edisi 3)*. Jakarta: Departemen Tenaga kerja.
- Sukirno, S. 2011. *Ekonomi Pembangunan. Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan (Edisi Kedua)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sulistiawati, R. 2012. Pengaruh Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Eksos*. 8 (3): 3-12.
- Sumarsono, Sonny. 2008. *Ekonomi manajemen sumberdaya manusia dan ketenagakerjaan*. Jember: Graha Ilmu.
- Suparjan, dan Hempri, S. 2008. *Pengembangan masyarakat: dari pembangunan sampai pemberdayaan*. Jakarta: Aditya Media.
- Suparmoko. 2006. *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek, Edisi Kelima*. Yogyakarta: Penerbit BPF.
- Susanti, S. 2013. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan di Jawa Barat dengan Menggunakan Analisis Data Panel. *Jurnal Matematika Integratif*. 9 (1): 1-18.
- Supranto, J. 2004. *Ekonometrika (Buku Kedua)* . Jakarta: Ghalia Indonesia.

Tarigan, R. 2005. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi Edisi Revisi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Todaro, Mischael. P. 2012. *Pembangunan Ekonomi Edisi Kesebelas*. Jakarta: Erlangga



LAMPIRAN

Pengangguran di Pulau Jawa Tahun 2010 – 2017 (jiwa)

Provinsi	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
DKI Jakarta	582.843	599.515	516.136	440.704	429.11	368.19	317.007	346.945
Jawa Barat	1.951.391	1.926.537	1.859.141	1.888.667	1.775.196	1.794.874	1.873.861	1.839.428
Jawa Tengah	1.046.883	1.203.342	982.093	1.054.062	996.344	863.783	801.33	823.938
DI Yogyakarta	107.148	84.494	77.397	63.172	67.418	80.245	57.036	64.019
Jawa Timur	828.943	1.050.333	828.615	878.543	843.49	906.904	839.283	838.496
Banten	726.377	696.811	514.783	494.17	484.053	509.383	498.596	519.563

Upah Minimum Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2010 – 2017 (rupiah)

Provinsi	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
DKI Jakarta	1118009	1290000	1529150	2200000	2441000	2700000	3100000	3355750
Jawa Barat	671500	732000	780000	850000	1000000	1000000	1312355	1420624
Jawa Tengah	660000	675000	765000	830000	910000	910000	910000	1367000
DI Yogyakarta	745694	808000	892660	947114	988500	988500	988500	1337645
Jawa Timur	630000	705000	745000	866250	1000000	1000000	1000000	1388000
Banten	955300	1000000	1042000	1170000	1325000	1600000	1600000	1931180

Inflasi di Pulau Jawa Tahun 2010 – 2017 (persen)

Provinsi	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
DKI Jakarta	5.95	3.97	4.52	8.90	8.95	3.30	2.37	3.07
Jawa Barat	6.37	3.37	3.83	8.38	7.60	2.73	2.75	3.61
Jawa Tengah	6.88	2.68	4.24	7.99	8.22	2.73	2.36	3.71
DI Yogyakarta	7.38	3.88	4.31	7.32	6.59	3.09	2.29	4.20
Jawa Timur	1.02	0.57	0.55	0.60	2.38	0.85	2.76	4.00
Banten	5.82	2.76	6.10	9.65	10.2	4.29	2.94	3.98

PDRB di Pulau Jawa Tahun 2010 – 2017 (miliar rupiah)

Provinsi	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
DKI Jakarta	1075184	1147558	1222528	1296695	1373389	1454564	1540078	1635856
Jawa Barat	906686	965622	1028410	1093544	1149216	1207232	1275528	1342953
Jawa Tengah	623225	656268	691343	726655	764959	806765	849313	894050
DI Yogyakarta	64679	68050	71702	75627	79536	83474	87688	92301
Jawa Timur	990649	1054402	1124465	1192790	1262684	1331376	1405561	1482148
Banten	271465	290546	310386	331099	349351	368377	387824	40996

Hasil Regresi Data Panel (*Common Effect*)

Dependent Variable: PENGANGGURAN

Method: Panel Least Squares

Date: 10/17/18 Time: 07:16

Sample: 2010 2017

Periods included: 8

Cross-sections included: 6

Total panel (balanced) observations: 48

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	653306.4	184834.5	3.534548	0.0010
UMP	-0.559918	0.104540	-5.356018	0.0000
INF	32398.66	24153.80	1.341348	0.1867
PDRB	0.844743	0.133702	6.318129	0.0000
R-squared	0.530039	Mean dependent var		798762.3
Adjusted R-squared	0.497996	S.D. dependent var		571246.9
S.E. of regression	404741.3	Akaike info criterion		28.73954
Sum squared resid	7.21E+12	Schwarz criterion		28.89547
Log likelihood	-685.7489	Hannan-Quinn criter.		28.79847
F-statistic	16.54158	Durbin-Watson stat		0.161929
Prob(F-statistic)	0.000000			

Hasil Regresi Data Panel (*Fixed Effect*)

Dependent Variable: PENGANGGURAN

Method: Panel Least Squares

Date: 10/17/18 Time: 07:17

Sample: 2010 2017

Periods included: 8

Cross-sections included: 6

Total panel (balanced) observations: 48

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1060935.	71945.69	14.74633	0.0000
UMP	-0.102663	0.038284	-2.681595	0.0107
INF	-2158.463	4838.081	-0.446140	0.6580
PDRB	-0.159424	0.115164	-1.384316	0.1741

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.987392	Mean dependent var	798762.3
Adjusted R-squared	0.984806	S.D. dependent var	571246.9
S.E. of regression	70413.57	Akaike info criterion	25.32952
Sum squared resid	1.93E+11	Schwarz criterion	25.68037
Log likelihood	-598.9085	Hannan-Quinn criter.	25.46211
F-statistic	381.7972	Durbin-Watson stat	1.701181
Prob(F-statistic)	0.000000		

Hasil Regresi Data Panel (*Random Effect*)

Dependent Variable: PENGANGGURAN

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)

Date: 10/17/18 Time: 07:21

Sample: 2010 2017

Periods included: 8

Cross-sections included: 6

Total panel (balanced) observations: 48

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	997680.5	145022.1	6.879508	0.0000
UMP	0.137333	0.036806	-3.731298	0.0005
INF	-0.277392	4824.529	-0.574962	0.0482
PDRB	-0.024870	0.106716	-0.233051	0.0168

Effects Specification

	S.D.	Rho
Cross-section random	312970.5	0.9518
Idiosyncratic random	70413.57	0.0482

Weighted Statistics

R-squared	0.534988	Mean dependent var	63336.78
Adjusted R-squared	0.489646	S.D. dependent var	96403.60
S.E. of regression	81251.35	Sum squared resid	2.90E+11
F-statistic	7.388072	Durbin-Watson stat	1.173170
Prob(F-statistic)	0.000411		

Unweighted Statistics

R-squared	0.050549	Mean dependent var	798762.3
Sum squared resid	1.46E+13	Durbin-Watson stat	0.023402

Hasil Uji *Chow*

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	282.953543	(5,39)	0.0000
Cross-section Chi-square	173.680908	5	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: PENGANGGURAN

Method: Panel Least Squares

Date: 10/17/18 Time: 07:18

Sample: 2010 2017

Periods included: 8

Cross-sections included: 6

Total panel (balanced) observations: 48

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	653306.4	184834.5	3.534548	0.0010
UMP	-0.559918	0.104540	-5.356018	0.0000
INF	32398.66	24153.80	1.341348	0.1867
PDRB	0.844743	0.133702	6.318129	0.0000
R-squared	0.530039	Mean dependent var		798762.3
Adjusted R-squared	0.497996	S.D. dependent var		571246.9
S.E. of regression	404741.3	Akaike info criterion		28.73954
Sum squared resid	7.21E+12	Schwarz criterion		28.89547
Log likelihood	-685.7489	Hannan-Quinn criter.		28.79847
F-statistic	16.54158	Durbin-Watson stat		0.161929
Prob(F-statistic)	0.000000			

Hasil Uji *Hausman*

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	17.586987	3	0.0005

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
UMP	-0.102663	-0.137333	0.000111	0.0010
INF	-2158.462808	-2773.921029	130948.521620	0.0890
PDRB	-0.159424	-0.024870	0.001875	0.0019

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: PENGANGGURAN

Method: Panel Least Squares

Date: 10/17/18 Time: 07:22

Sample: 2010 2017

Periods included: 8

Cross-sections included: 6

Total panel (balanced) observations: 48

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1060935.	71945.69	14.74633	0.0000
UMP	-0.102663	0.038284	-2.681595	0.0107
INF	-2158.463	4838.081	-0.446140	0.6580
PDRB	-0.159424	0.115164	-1.384316	0.1741

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.987392	Mean dependent var	798762.3
Adjusted R-squared	0.984806	S.D. dependent var	571246.9
S.E. of regression	70413.57	Akaike info criterion	25.32952
Sum squared resid	1.93E+11	Schwarz criterion	25.68037
Log likelihood	-598.9085	Hannan-Quinn criter.	25.46211
F-statistic	381.7972	Durbin-Watson stat	1.701181
Prob(F-statistic)	0.000000		

Hasil Uji Multikolinieritas

	UMP	INF	PDRB
UMP	1.000000	0.044356	0.382264
INF	0.044356	1.000000	-0.246989
PDRB	0.382264	-0.246989	1.000000

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Dependent Variable: RESABS
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 10/17/18 Time: 07:41
 Sample: 2010 2017
 Periods included: 8
 Cross-sections included: 6
 Total panel (balanced) observations: 48
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-60546.53	91520.31	-0.661564	0.5117
UMP	0.398587	0.051763	7.700274	0.0559
INF	-20237.10	11959.69	-1.692109	0.0977
PDRB	0.102369	0.066202	1.546308	0.1292

Effects Specification

	S.D.	Rho
Cross-section random	0.000000	0.0000
Idiosyncratic random	200406.6	1.0000

Weighted Statistics

R-squared	0.526447	Mean dependent var	413721.3
Adjusted R-squared	0.494159	S.D. dependent var	379631.8
S.E. of regression	270003.6	Sum squared resid	3.21E+12
F-statistic	16.30487	Durbin-Watson stat	0.520896
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics

R-squared	0.526447	Mean dependent var	413721.3
Sum squared resid	3.21E+12	Durbin-Watson stat	0.520896

Hasil Uji Normalitas

